

**PERSEPSI ANTARA ANGGOTA PARTAI POLITIK DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BOYOLALI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Mengikuti Seminar Proposal Skripsi**



**Oleh:**

**ANIS MONIKA**

**16.52.2.1.192**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

**2020**

PERSEPSI ANTARA ANGGOTA PARTAI POLITIK DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BOYOLALI

SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

Anis Monika

NIM: 16.52.21.192

Surakarta,

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahzar', with a large, sweeping horizontal stroke above it.

Fahri Ali Ahzar, M.Si  
NIK. 19910513 201701 1 124

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANIS MONIKA

NIM : 16.52.21.192

JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PERSEPSI ANTARA ANGGOTA PARTAI POLITIK DENGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BOYOLALI”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 15 Oktober 2020

Anis Monika

## **SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANIS MONIKA

NIM : 165221192

JURUSAN/PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Boyolali”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan memperoleh data dari hasil penyebaran kuesioner kepada anggota partai politik yang berkedudukan di DPRD Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kesbangpol dan BKD. Apabila di kemudian hari diketahui skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Oktober 2020

Anis Monika

Fahri Ali Ahzar, M.Si  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Anis Monika

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperti ini, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Anis Monika NIM: 16.52.21.192 yang berjudul :

PERSEPSI ANTARA ANGGOTA PARTAI POLITIK DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BOYOLALI

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 November 2020  
Dosen Pembimbing Skripsi



Fahri Ali Ahzar, M.Si.  
NIK. 19910513 201701 1 12

**PENGESAHAN**

**PERSEPSI ANTARA ANGGOTA PARTAI POLITIK DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BOYOLALI**

Oleh:

**ANIS MONIKA**

**NIM. 16.52.21.192**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020/ 6 Jumadal Awwal dan dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)  
Usnan, SEI, MEI  
NIP. 19850919 201403 1 001



Penguji II  
Fitri Laela Wijayati, SE., M.Si  
NIP. 19860625 201403 2 003



Penguji III  
Samsul Rosadi, M.Si  
NIP. 19871221 201701 1 165

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, SE., M.Si.  
NIP. 19720304 200112 1 004

## MOTTO

أَخُو الْعِلْمِ حَيٌّ خَالِدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ ﴿٥٦﴾ وَأَوْصَالُهُ تَحْتَ التُّرَابِ رَمِيمٌ  
وَدُو الْجَهْلِ مَيِّتٌ وَهُوَ يَمْشِي عَلَى النَّارِ ﴿٥٧﴾ يُظَنُّ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَهُوَ عَدِيمٌ

“Orang yang berilmu akan tetap hidup setelah matinya walaupun tulang-tulanganya telah hancur di bawah bumi, sementara orang yang bodoh telah mati walaupun masih berjalan di atas bumi, disangkanya dia hidup padahal dia telah tiada”.

(Kitab Alala : 17-18 )

إِذَا الْفَتَى حَسْبَ اعْتِقَادِهِ رُفِعَ ﴿٥٨﴾ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

“Pemuda tergantung tekadnya yang kuat. Tanpa tekad jelas tak dapat manfaat”.

(Kitab Imrithi : 17)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (Q.S. Al-Baqarah : 286)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah atas nikmat Allah SWT tak lupa sholawat serta salam saya haturkan teruntuk BagindaNabi Muhammad SAW. Karenanya penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan dimudahkan oleh-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya dan juga simbah putri yang selalu mendoakan dan menyemangati dan keluargaku yang sangat kusayangi.

Pengasuh PP Mambaul Barokah Ngumbul, Kemas. Bapak Nur Fauzi Akhmad dan Ibu Ni'matun Minalloh atas segala bimbingan, semangat dan doanya. semoga Allah selalu melimpahkan nikmatNya kepada beliau. Aamiin

Tak lupa adik-adik saya semua santri PP Mambaul Barokah, terutama untuk santri putri yang tak dapat saya sebutkansatu persatu namanya. Terimakasih atas doa, semangat, dan usilnya. Kalian terbaik dihatiku.

Dan sahabatku Latifah Ayu Idawati yang selalu menemaniku mencari data dan mengerjakan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi sahabat setiaku, berjuang bersamaku. Semangat.

Dan semua orang yang telah ikut andil dalam menyemangati yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih semua atas doa dan semangatnya.



## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Antara Anggota Partai Politik engan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Boyolali” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Penulis menyadari telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oeh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudofir, S. Ag, M. Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Anim Rahmayati,S.E.I, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Sayekti Endah Retno Meilani, SE., M.Si., AK., CA., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Fahri Ali Ahzar.,M.Si., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibuku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat penulis dalam segala hal.
9. Bapak dan Ibu kedua-dua sekaligus Pengasuh PP Mambaul Barokah yang selalu menyemangati, mendoakan, dan membantu dalam berbagai hal dalam penulisan skripsi ini.
10. Adik-adikku sayang santri putri PP Mambaul Barokah yang selalu menyemangati penulis, selalu bersama dalam suka dan duka.
11. Sahabat-sahabatku dan teman-teman Akuntansi Syariah angkatan 2016 yang telah memberikan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. terima kasih untuk Latifah Ayu Idawati yang selalu berjuang bersamaku.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan selama menyusun skripsi.

Terhadap semuanya tadi kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Oktober 2020

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the differences in perceptions between members of political parties and local government of political parties and local regarding the financial accountability of political parties.*

*The object of research is political parties that have a position in the Boyolali Regency DPRD and local governments represented by BKD and Kesbangpol. This research uses descriptive quantitative method. Analysis and hypothesis testing in this study using the SPSS 22 program.*

*The result showed that there were differences in perceptions between member of political parties and local governments regarding annual financial accountability. There are also differences in the accountability of campaign funds, and there are differences in the accountability of APBD funds.*

*Keyword : Perception, accountability, political party annual finances, campaign funds, APBD funds.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya perbedaan persepsi antara anggota partai politik dan pemerintah daerah terkait dengan akuntabilitas keuangan partai politik.

Objek penelitian yaitu pada partai politik yang mempunyai kedudukan di DPRD Kabupaten Boyolali dan pemerintah daerah yang diwakili oleh BKD dan Kesbangpol. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Analisis dan uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara anggota partai politik dan pemerintah daerah terkait akuntabilitas keuangan tahunan. Terdapat perbedaan persepsi juga pada akuntabilitas dana kampanye, serta terdapat perbedaan pada akuntabilitas dana APBD.

Kata Kunci : Persepsi, akuntabilitas, keuangan tahunan partai politik, dana kampanye, dana APBD.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN .....	iv
NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Batas Masalah .....	9
1.4 Rumus Masalah.....	9
1.5 Tujuan Masalah.....	10
1.6 Manfaat Masalah.....	11

1.7 Jadwal Masalah .....	11
1.8 Sistematika Masalah .....	11
<b>BAB IILANDASAN TEORI</b>	
2.1 Kajian Teori .....	13
2.1.1 <i>Agency Theory</i> .....	13
2.1.2 Persepsi .....	15
2.1.2.1 Pengertian Persepsi .....	15
2.1.2.2 Hal-Hal yang Memperngaruhi Persepsi .....	15
2.1.2.3 Proses Terjadinya Persepsi .....	16
2.1.3 Akuntabilitas .....	17
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas .....	17
2.1.3.2 Tujuan Akuntabilitas .....	17
2.1.3.3 Prinsip Akuntabilitas .....	18
2.1.3.4 Dalil Akuntabilitas .....	19
2.1.4 Keuangan Partai Politik .....	21
2.1.5 Dana Kampanye .....	24
2.1.6 Dana APBD .....	25
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan .....	26
2.3 Kerangka Berpikir .....	29
2.4 Hipotesis .....	30
2.4.1 Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah	
Daerah tentang Akuntabilitas Keuangan Tahunan .....	30

2.4.2 Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah	
Daerah tentang Akuntabilitas Dana Kampanye .....	32
2.4.3 Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah	
Daerah tentang Akuntabilitas Dana APBD/APBN .....	33

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian.....	34
3.2 Jenis Penelitian.....	34
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	34
3.3.1 Populasi.....	34
3.3.2 Sampel.....	35
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel .....	36
3.4 Data dan Sumber Data .....	37
3.4.1 Data Primer .....	37
3.4.2 Data Skunder.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5.1 Kuesioner .....	37
3.5.2 Dokumentasi .....	38
3.6 Variabel Penelitian.....	38
3.7 Definisi Operasional Variabel.....	38
3.8 Instrumen Penelitian .....	40
3.9 Uji Instrumen Penelitian .....	41
3.9.1 Uji Kualitas Data.....	41
3.9.2 Uji Validitas .....	41

3.9.3 Uji Reliabilitas .....	41
3.10 Teknik Analisis Data.....	42
3.10.1 Uji Normalitas.....	42
3.10.2 Uji Hipotesis .....	42
3.10.3 Independent Sample t-Test (Uji t).....	42
 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	44
4.1.1 Partai Politik Kabupaten Boyolali .....	44
4.1.2 Profil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Boyolali.....	46
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	47
4.2.1 Deskripsi Kuesioner.....	47
4.2.2 Deskripsi Karakteristik Responden.....	48
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	50
4.3.1 Hasil Pengujian Instrumen .....	50
4.3.1.1 Uji Validitas.....	50
4.3.1.2 Uji Reliabilitas.....	52
4.3.1.3 Uji Normalitas .....	53
4.3.2 Pengujian Hipotesis .....	54
4.3.2.1 Pengujian Hipotesis 1 (satu) Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Keuangan Tahunan.....	54



4.3.2.2	Pengujian Hipotesis 2 (dua) Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Dana Kampanye .....	55
4.3.2.3	Pengujian Hipotesis 3 (tiga) Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Dana APBD .....	56
4.4	Pembahasan Hipotesis .....	57
4.4.1	Hipotesis Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Keuangan Tahunan .....	57
4.4.2	Hipotesis Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Dana Kampanye...	58
4.4.3	Hipotesis Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Dana APBD .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	62
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	63
5.3	Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1215 Kepala Daerah Tersangka Kasus Korupsi 2010-2017 .....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 4.1 Perolehan Kursi DPRD Pemilu 2019 Kabupaten Boyolali.....	45
Tabel 4.2 Daftar Responden Penelitian.....	48
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir Partai Politik .....	48
Tabel 4.4 Lama Bekerja Partai Politik .....	49
Tabel 4.6 Jabatan Partai Politik.....	49
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Item Akuntabilitas Keuangan Tahunan.....	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Item Akuntabilitas Dana Kampanye .....	51
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Item Dana APBD .....	52
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas .....	53
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas .....	53
Tabel 4.14 Hasil Independent Sample T-test .....	54
Tabel 4.15 Hasil <i>Independent Sample T-test</i> .....	55
Tabel 4.16 Hasil <i>Independent Sample T-test</i> .....	56

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	30
-----------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Jadwal Penelitian .....	68
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian .....	70
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian.....	71
Lampiran 4 Kuesioner Anggota Partai Politik.....	72
Lampiran 5 Kuesioner Pemerintah Daerah .....	75
Lampiran 6 Hasil Demografi Partai Politik .....	79
Lampiran 7 Hasil Demografi Pemerintah Daerah.....	80
Lampiran 8 Uji Reliabilitas.....	81
Lampiran 9 Uji Normalitas .....	82
Lampiran 10 Uji t atau Beda .....	83
Lampiran 11 Uji Validitas.....	85
Lampiran 12 Hasil Tabulasi Partai Politik .....	90
Lampiran 13 Hasil Tabulasi Pemerintah Daerah .....	94
Lampiran 14 Bukti Plagiasi.....	96

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut prinsip demokrasi. Sebagai Negara demokrasi tentunya semua rakyat bebas menyampaikan segala aspirasinya. Dalam ranah politik alat yang digunakan untuk mewadahi aspirasi masyarakat yaitu dengan menggunakan partai politik. Dibentuknya partai politik tak lain bertujuan untuk menegakkan tonggak demokrasi di Negara ini.

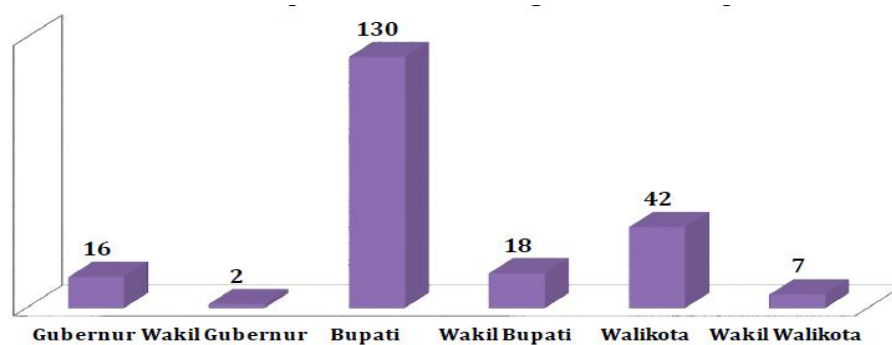
Menurut Suhery, dkk. (2017) Partai Politik merupakan organisasi yang bersifat nasional, dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi (Undang-Undang No. 2 Tahun 2011).

Sedangkan menurut Eko (2015), partai politik adalah sekumpulan individu yang terorganisir, terstruktur tugas dan fungsinya serta cita-cita dalam mencapai sebuah kekuasaan sebagai instrumen untuk tercapainya arah dan tujuan kebijakan yang dipilih. Jadi partai politik yaitu, sekelompok orang, berkewarganegaraan Indonesia yang berkeinginan untuk mencapai kekuasaan

dan berkepentingan memperjuangkan kepentingan bersama demi persatuan NKRI.

Berbicara mengenai aspirasi politik tidak lepas dari dua hal, yaitu kepercayaan dan komitmen (Kholmi, 2010). Akan tetapi, akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat kepada partai mulai menurun drastis (Rohmah, 2010). Menurunnya tingkat kepercayaan tersebut dikarenakan beberapa faktor, antaranya banyaknya kasus korupsi yang kebanyakan bersumber dari partai politik.

Tabel 1.1  
215 Kepala Daerah Tersangka Kasus Korupsi 2010-2017



Sumber : ICW 2018

Berdasarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2010-2017 terdapat 215 Kepala Daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Dengan berbagai modus perlakuan seperti suap pengesahan anggaran, suap perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga suap penanganan perkara. Dan menurut dari berbagai hasil penelitian ICW, terkait keuangan partai dan dana kampanye, penyebab utama politisi melakukan korupsi yaitu karena mahalannya ongkos memenangkan pemilu (ICW, 2018).

Salah satu cara penanggulangan kasus korupsi yang banyak terjadi di ranah politik, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan perubahan besaran dana politik menjadi Rp. 8.461 per suara (Kompas.com). Dengan adanya berita kenaikan dana APBN/APBD tersebut maka pemerintah berharap kepada partai politik untuk menjadikan demokrasi yang lebih baik lagi di pemerintahan Indonesia. Selain itu karena dana yang dikeluarkan pemerintah jika dihitung berkisar kurang lebih Rp.6 Triliun, maka tentunya pemerintah sangat menuntut transparansi dan akuntabilitas dari partai sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah sendiri.

Sumber dana partai politik berasal dari beberapa pihak. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai Politik, “bahwa setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Permendagri No. 36 Tahun 2018, BAB II terkait Penghitungan Bantuan Keuangan, menjabarkan bahwa Bantuan Keuangan terbagi menjadi tiga yaitu di pemerintah pusat memberikan kepada partai pusat yang mendapatkan kursi di DPR yang bersumber dari APBN dengan besaran nilai Rp 1.000., per suara sah. Gubernur memberikan kepada partai yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi dengan besaran nilai Rp 1.200.,

per suara sah. Bupati memberikan kepada partai yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota yang bersumber dari APBD Kabupaten/kota dengan besaran nilai Rp 1.500., per suara sah. Bantuan diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah dan diberikan setiap tahun.

Dalam Permendagri No. 36 Tahun 2018, pada BAB VII tentang Penggunaan Bantuan Keuangan. Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, serta untuk operasional sekretariat partai politik. Dengan bentuk kegiatan, seperti seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, *workshop*, dan kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Berasal dari dana anggaran pemerintah inilah partai dituntut untuk akuntabel dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Tak hanya itu saja partai politik juga mempunyai beban untuk memperbaiki tata kelola partai, dimana untuk mengembalikan kembali citra baik partai agar demokrasi di Negara ini lebih bersih dari politik uang dan korupsi, oleh karena itu pemerintah juga mengatur terkait akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik.

Menurut UU No. 2 Tahun 2011 sebagai perubahan UU No. 2 Tahun 2008 khususnya pasal 39 menyebutkan bahwa : (1) Pengelolaan keuangan partai politik diatur lebih lanjut dalam AD/ART diubah menjadi “Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel”, sedangkan



ditekan pada poin selanjutnya terkait akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik (2) Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud ayat 1 yang akan diaudit oleh akuntan publik dan di umumkan secara periodik. Dan ayat selanjutnya juga menyebut bagaimana partai politik harus memberikan laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan arus kas.

Pencatatan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel akan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kinerja partai politik dalam upaya bersama pencegahan terjadinya kejahatan kerah putih (Rohmah, 2014). Oleh karena itu, sangat penting adanya transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan partai, karena untuk meningkatkan kinerja partai. Berdasarkan anggaran dasar partai politik, sebuah partai politik dituntut untuk menjalankan amanat partai dan mengamati jalannya pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta (Suhery. dkk, 2017).

Dalam penelitian ini, memilih Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai objek penelitian, dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi pengurus partai, anggota partai, serta pemerintah daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan partai politik. Sebagai daerah yang telah mencapai MCP tertinggi, dimana mencapai 95%. Hal ini berpengaruh terhadap skor rata-rata yang diraih oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 63%. Sehingga mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Predikat Terbaik Capaian Aksi Koordinasi dan

Supervisi Pencegahan Korupsi Nasional Tahun 2019 (fokusjateng.com). Dalam penelitian, persepsi mereka diharapkan mampu menjadi contoh untuk daerah lain dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan partai politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Kholmi (2010) di Kota Malang. Menurut konstituen hasil penelitiannya yaitu, mengenai pelaporan keuangan tahunan dan dana kampanye partai politik masih dalam tingkatan sedang dan rendah. Adapun upaya agar partai dapat meningkatkan akuntabilitasnya, yaitu terdapat peraturan yang jelas dan tegas dari KPU atau pemerintah, transparansi dana kampanye, keuangan partai politik diawasi serta dikendalikan oleh kelompok yang independen, lembaga penegakan hukum yang efektif, meningkatkan peran dari akuntan publik, serta dengan mengembangkan kredibilitas partai politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2013) di Malang. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik. Sedangkan untuk hipotesis kedua menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas laporan dana kampanye. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2011) di UNESA. Menurut mahasiswa Unesa, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas partai politik masih tergolong rendah, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja partai politik yang mengakibatkan banyaknya kejahatan kerah putih di Indonesia yang susah diminimalisir. Serta kurangnya pertanggungjawaban akan transparansi dan

akuntabilitas laporan keuangan partai politik menyebabkan banyaknya kasus korupsi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Arsianti (2015) di Kota Malang. Mengenai akuntabilitas dana kampanye menunjukkan bahwa partai politik belum mempunyai karakteristik yang baik untuk melaporkan sumbangan dana kampanye dalam bentuk barang maupun jasa kepada KPU. Mengenai transparansi keuangan partai politik menunjukkan bahwa laporan pengeluaran keuangan partai politik telah dapat diakses oleh publik. Penelitian oleh Kholmi (2013) di Kota Malang. Menurut pengurus partai, partai politik telah memenuhi kriteria akuntabilitas dalam melaporkan keuangan partai politik. Mereka berpendapat akan mengaplikasikan tiga kategori akuntabilitas partai politik, antara lain akuntabilitas keuangan tahunan, akuntabilitas dana kampanye, dan akuntabilitas keuangan dana dari APBD.

Penelitian yang dilakukan oleh Arnold (2012) di Amerika Latin. Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara kelompok berdasarkan pengetahuan politik. Persepsi tentang korupsi oleh warga negara dibentuk melalui kesadaran berpolitik yang diukur dengan indeks pengetahuan politik, serta pentingnya pemantauan oleh warga negara yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas demokratis.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berkeinginan untuk mengetahui persepsi dari dua sisi, oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“PERSEPSI ANTARA ANGGOTA PARTAI POLITIK DENGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP**

**AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BOYOLALI”.** Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, terdapat dari berbagai sisi persepsi terkait akuntabilitas laporan keuangan politik, mulai dari persepsi mahasiswa, auditor, pengurus partai, masyarakat, dan akuntan publik. Penelitian merupakan gabungan dari dua persepsi yaitu dari partai politik sebagai *agent* dan dari pemerintah daerah yang dimana menjadi *principal*.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Pada penelitian ini terdapat beberapa permasalahan antara lain:

1. Kebanyakan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia berasal dari partai politik. Jawa Tengah berada di tingkat 3 paling banyak kasus korupsi se-Indonesia. Untuk menanggulangi kasus korupsi tersebut, maka pemerintah menaikan dana APBD/APBN untuk operasional partai politik.
2. Menurut penelitian Kholmi (2013), bahwa pengurus partai sepakat untuk meningkatkan akuntabilitas dengan kategori akuntabilitas keuangan tahunan, akuntabilitas keuangan dana kampanye, dan akuntabilitas keuangan dana APBD. Oleh karena itu, dengan adanya pengelolaan kategori tersebut mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan partai politik guna mencegah terjadinya fraud.

### **1.3. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahan persepsi maka penulis akan memberikan pembatasan masalah, yaitu:

1. Akuntabilitas laporan keuangan pada partai politik akan diteliti dengan melalui persepsi anggota partai politik yang dimana partai tersebut mendapatkan kursi di DPRD, terdapat 5 partai yaitu PDI, Golkar, PKS, PKB, dan Gerindra serta Pemerintah daerah.
2. Keduanya akan diambil dari orang-orang yang mengetahui tentang akuntabilitas laporan keuangan partai politik.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut.

1. Apakah ada perbedaan persepsi antara anggota partai politik dan Pemerintah Daerah tentang indikator akuntabilitas keuangan tahunan partai politik?
2. Apakah ada perbedaan persepsi antara anggota partai politik dan Pemerintah Daerah tentang indikator akuntabilitas dana kampanye?
3. Apakah ada perbedaan persepsi antara anggota partai politik dan Pemerintah Daerah tentang indikator akuntabilitas dana APBD/APBN ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memperoleh informasi dan bukti empiris adanya perbedaan persepsi antara anggota partai politik dan Pemerintah Daerah tentang indikator akuntabilitas keuangan tahunan partai politik.
2. Untuk memperoleh informasi dan bukti empiris adanya perbedaan persepsi antara anggota partai politik dan Pemerintah Daerah tentang indikator akuntabilitas dana kampanye.
3. Untuk memperoleh informasi dan bukti empiris adanya perbedaan persepsi antara anggota partai politik dan Pemerintah Daerah tentang indikator akuntabilitas dana APBD/APBN.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

##### **1. Bagi Penulis**

Untuk memperluas pengetahuan pengelolaan dana serta penerapan akuntabilitas laporan keuangan pada partai politik.

##### **2. Bagi Praktisi**

Sebagai bahan pertimbangan pengelolaan keuangan partai dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan partai. Serta untuk menjadikan masukan untuk kedua belah pihak terkait laporan keuangan partai politik.

##### **3. Bagi Akademisi**

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah referensi serta bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

### **1.7 Jadwal Penelitian**

(Terlampir)

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian bagi pihak penulis, pihak praktisi dan pihak akademik serta Sistematika Penulisan Skripsi.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini diuraikan beberapa teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yaitu tentang Akuntabilitas, Transparansi Laporan Keuangan, Partai Politik, dan Fraud.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan tentang metodologi penelitian seperti Desain Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Validitas dan Reliabilitas Data

#### BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisis data dan pembahasan yang berisi uraian tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan analisis data sebagai hasil interpretasi hasil analisis serta pembahasan hasil analisis.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 *Agency Theory*

Akuntabilitas merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi *profit* maupun *non profit*. Menurut Kholmi (2010) bahwa akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara *agent* dan *principal*. Hubungan keagenan adalah kontrak antara *principal* yang melibatkan seorang *agent* guna pelimpahan wewenang terhadap *agent* terkait pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Masalah keagenan timbul karena adanya konflik akibat perbedaan tujuan *principal* dengan tujuan *agent* dan *principal* mengalami kesulitan dan melakukan konfirmasi mengenai fakta yang dilakukan oleh *agent* (Eisenhardt, 1989).

Dalam Kholmi (2010), menurut Gray dan Jenkins (1993) menyatakan bahwa hubungan akuntabilitas terbagi menjadi tiga unsur, yaitu *agent*, *principal*, dan aturan akuntabilitas. *Agent* merupakan pihak yang diberi tanggung jawab dan melaporkan terkait semua yang telah dilakukannya. *Principal* adalah pihak yang memberi tanggung jawab kepada *agent* dan akan memberi sanksi jika *agent* melaporkan tidak sesuai dengan sebenarnya atau agen bersalah. Sedangkan aturan (*code*) merupakan dasar yang mengikat keduanya berisi tentang peraturan akuntabilitas dalam penyajian akun dari *agent* terhadap *principal*, sehingga prinsipal berharap terhadap agennya terkait sumber daya, aktivitas, serta tanggung jawab yang diberikannya kepada agen tersebut.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), biaya agensi dikelompokkan menjadi bagian, yaitu:

- a. *The monitoring expenditure*, adalah biaya yang dikeluarkan *principal* untuk mengawasi *agent*.
- b. *The bonding expenditure*, adalah biaya yang dikeluarkan oleh *agent* guna menetapkan dan menjalankan mekanisme kerja agar sesuai dengan keinginan *principal*.
- c. *The residual loss*, adalah penurunan tingkat kemakmuran *principal* atau *agent* yang disebabkan hubungan keagenan.

Menurut Eisenhardt (1989), tiga asumsi sifat dasar manusia, yaitu:

- a. Manusia memiliki sifat individualisme yang mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain (*self interest*).
- b. Manusia memiliki pemikiran yang terbatas mengenai pandangan untuk masa mendatang (*bounded rationalty*).
- c. Manusia selalu menghindari diri dari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi tersebut, anggota partai politik atau kandidat sebagai manusia kemungkinan dalam melakukan tindakan akan mengutamakan kepentingan pribadinya. Hal ini mengakibatkan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Penerapan teori keagenan dalam proses penyusunan laporan keuangan politik disini, yaitu: partai politik merupakan *agent* yang menyalurkan aspirasi rakyat serta partai politik juga harus bertanggung jawab melaporkan uang negara

yang telah mendanai untuk kelangsungan hidup partai. Sedangkan yang berperan sebagai principal disini adalah masyarakat dan negara. Oleh karena, itu untuk mengawasi terkait pelaporan keuangan partai politik serta pelaksanaan pemilihan umum tersebut pemerintah menunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

## **2.1.2 Persepsi**

### **2.1.2.1 Pengertian Persepsi**

Persepsi adalah suatu proses penerimaan stimulus oleh individu melalui panca indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan menjadi sesuatu yang berarti (Walgito, 2005). Menurut Robbins (2002) bahwa persepsi adalah sebuah proses di mana seorang individu mengorganisasikan dan mengeintepretasikan kesan sensori yang mereka memiliki kepada lingkungan sekitar. Riset tentang persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat suatu hal yang sama, akan tetapi memahaminya dengan cara berbeda (Arsianti, 2015). Jadi, persepsi adalah stimulus yang diterima oleh panca indera sebagai bentuk untuk mengetahui sesuatu hal dengan cara pemahan yang berbeda-beda antara individu satu dengan lainnya.

### **2.1.2.2 Hal-hal yang Mempengaruhi Persepsi**

Berdasarkan pandangan Robbins dan Judge (2012), persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Faktor-faktor dalam diri pribadi persepsi. Karakter pribadi manusia yang dapat mempengaruhi persepsi antara lain, tata cara perilaku, karakter, keinginan atau kehendak, pengalaman, serta harapan seseorang.
- b. Faktor-faktor dalam diri target. karakteristik target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang diinterpretasikan antara lain, sesuatu yang kontemporer, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kesamaan.
- c. Faktor-faktor dalam situasi. Karakter yang mempengaruhi antara lain, waktu, keadaan kerja, dan keadaan sosial.

#### **2.1.2.3 Proses Terjadinya Persepsi**

Menurut Walgito (2010), menjelaskan proses terjadinya persepsi melalui tiga tahap, antara lain:

- a. Tahap kealaman (fisik)

Tahap kealaman disebut juga sebagai tahap fisik. Tahap kealaman adalah proses adanya objek yang menimbulkan stimulus dan rangsangan yang mengenai alat indera, dan stimulus yang diterima oleh indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak.

- b. Tahap fisiologis

Pada tahap ini, stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Seperti timbulnya pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu hal karena rasa ingin tahu.

- c. Tahap psikologis

Tahap psikologis adalah proses di otak sebagai pusat kesadaran, sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang di dengar. Adanya alam

dan psikologis dalam diri individu untuk tahu lebih dalam tentang apa yang dipersepsikan.

### **2.1.3 Akuntabilitas**

#### **2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik (Umami dan Nurodin, 2017). Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak *agent* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada *principal* yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggung jawaban kepada *agent*.

Sedangkan menurut Penny (2014), Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja. Jadi dapat disimpulkan, akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau sekelompok (organisasi) untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang telah memberikan amanah kepada pihak tersebut.

#### **2.1.3.2 Tujuan Akuntabilitas**

Menurut Ghartey (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban

harus dilaksanakan. Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan dan hambatan tersebut harus segeradikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan bisa mncapai tujuan yang diharapkan.

### **2.1.3.3 Prinsip Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (2000), disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan manfaat yang telah diperoleh.
- e. Harus jujur, obyektif, ransparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

### 2.1.3.4 Dalil Akuntabilitas

Akuntabilitas sendiri telah diatur dalam Al-Qur'an sebagaimana firman

Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Menurut Chairany dan Nurul (2011), Dalam ayat di atas tersirat bahwa kejujuran dan akuntabilitas merupakan hal yang harus dijunjung tinggi demi mnghindari kemungkinan persoalan yang akan timbul. Oleh karena itu, partai dituntut harus membuat laporan serta melaporkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti yang diungkapkan oleh Kholmi (2010) bahwa:

“Sebagai institusi publik, maka sebuah partai politik harus bertanggungjawabkan tindakannya kepada publik, termasuk sumber-sumber keuangan yang diperoleh dalam membiayai kegiatan parpol yang bersangkutan, dengan demikian publik akan m udah mengawasi dan m enilai k ebijakan dan gerakan politik yang dilakukan oleh parpol. Dan karena parpol sebagai agen harus dapat memberikan pertanggungjawaban berkaitan dengan seluruh aktivitasnya, kemudian menyajikannya dan melaporkan baik kepada KPU atau masyarakat melalui media masa atau lewat internet yang dapat diakses langsung oleh publik.”



Partai politik memiliki beberapa sumber dana entah dari internal maupun eksternal, oleh karena itu dengan adanya hal tersebut maka partai politik sangatlah dituntut untuk melaporkan segala kegiatannya. Entah untuk masyarakat terkait dana kampanye, untuk anggotanya sendiri, maupun untuk negara berkaitan dengan APBD.

#### **2.1.4 Keuangan Partai Politik**

Keuangan partai politik merupakan sumber dana untuk melancarkan segala aksinya. Sumber dari keuangan partai tersebut tentunya berasal dari beberapa sumber, antara lain:

- a. Iuran Anggota
- b. Sumbangan, berupa uang, barang/ jasa, yang sah menurut hukum, dan
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bantuan keuangan dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD. (uu No. 2 Tahun 2011).

Sumbangan yang dimaksud yaitu sumbangan secara sukarela, terbuka, tanggung jawab, serta mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan partai politik diaudit oleh BPK, agar prinsip akuntabilitas dapat ditegakkan. Peraturan terkait dengan keuangan partai politik juga telah diatur dalam PSAK 45. Karena pelaporan keuangan merupakan bukti adanya tanggung jawab dari sebuah kegiatan. Oleh karena itu, parpol pun juga harus melaporkan semua dana secara transparan kepada publik. Dengan adanya transparansi disini akan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Dalam Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan keuangan partai politik terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat mengakses laporan keuangan tersebut di web resmi masing-masing partai politik. Dalam pasal 39 dari UU No. 2 Tahun 2011 ini juga menyatakan:

1. Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.
3. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
  - a. Laporan realisasi anggaran Partai Politik
  - b. Laporan neraca, dan
  - c. Laporan arus kas

Menurut KPU dan IAI (2003), Pemakai Laporan Keuangan Partai Politik adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan akan informasi keuangan partai politik, dan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pihak Internal, yaitu pihak pemakai informasi keuangan di dalam organisasi partai politik. Yang termasuk pihak internal adalah:
  - a. Anggota Partai Politik, berkepentingan untuk mengetahui manajemen penggunaan dana yang telah mereka berikan melalui iuran maupun sumbangan, apakah telah digunakan sesuai dengan amanat partai dalam rangka kepentingan nasional dan menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja kepengurusan partai.

- b. Pengurus, dalam rangka pengelolaan sumber daya partai politik.
2. Pihak Eksternal, yaitu para pemakai informasi keuangan di luar organisasi partai politik. Yang termasuk pihak eksternal adalah:
- a. Komisi Pemilihan Umum, mempunyai kepentingan untuk menilai ketaatan dan kepatuhan partai politik terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pemerintah (pemberi subsidi), mempunyai kepentingan atas subsidi atau bantuan dari anggaran Negara yang diberikan pemerintah (pusat maupun daerah) mengenai restriksi / pembatasan misalnya dalam hal larangan bagi partai politik untuk menggunakan dana yang mereka peroleh dari pemerintah untuk mendanai kegiatan kampanye pemilu.
  - c. Masyarakat, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi non pemerintah (LSM-Lembaga Swadaya Masyarakat) yang secara luas berkeinginan untuk mengetahui sejauh manakah cara partai politik mengelola keuangan, serta menilai apakah partai politik telah mampu menerapkan prinsip *good polotocal party governance*.
  - d. Penyumbang (donator), memiliki kepentingan untuk menilai apakah sumbangan yang telah diberikan digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan partai politik.
  - e. Pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan akan informasi dalam laporan keuangan partai politik.

### **2.1.5 Dana Kampanye**

Berdasarkan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013, Dana Kampanye Pemilu adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu. Laporan yang harus dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu berkaitan dengan dana kampanye yaitu, laporan pembukuan rekening khusus, laporan awal dana kampanye, dan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran sumbangan yang dilaporkan secara berkala (Himawan, 2014).

Peraturan terkait dana kampanye telah diatur dalam PSAK 45, akan tetapi terdapat pula peraturan KPU yang mengatur dana tersebut, yaitu PKPU No. 29 Tahun 2018 perubahan atas PKPU No. 24 Tahun 2018. Dimana di pasal 13 menyatakan bahwa dana kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD bersumber dari:

- a. Partai Politik
- b. calon anggota DPR dan DPRD dari partai politik yang bersangkutan.
- c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pelaporan yang dibuat oleh partai politik peserta pemilu anggota DP dan DPRD terdapat didalam pasal 38 PKPU No. 29 Tahun 2018 pula, dimana harus memuat informasi:

- a. RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye).
- b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
- c. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari

penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum pembukuan LADK.

- d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari partai politik dan pihak lain,
- e. NPWP Partai Politik.

Menurut Bastian (2007) dalam Kholmi (2013) Tuntutan akuntabilitas merupakan suatu hal yang logis, dikarenakan sumber dana kampanye bersumber dari perseorangan dan swasta. Selain itu akuntabilitas juga merupakan sebuah kepatuhan terhadap aturan. Seluruh sumber daya keuangan yang digunakan untuk dana kampanye sebuah partai politik harus dipertanggungjawabkan, yaitu penyampaian Laporan Dana Kampanye (peserta pemilu) yang telah diaudit Akuntan Publik ke KPU serta transparansi.

#### **2.1.6 Dana APBD**

Partai politik merupakan salah satu institusi yang juga dibiayai oleh negara. Oleh karena itu untuk pelaporan juga diatur oleh negara. Adapun yang mengatur tentang dana APBD partai politik yaitu Permendagri No. 36 Tahun 2018. Dalam BAB II tentang penghitungan bantuan keuangan menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.

Perolehan dana APBD tersebut diberikan sesuai dengan perolehan suara partai politik. Dimana menurut pasal Permendagri No. 36 Tahun 2018 ayat 4 bahwa “besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yaitu sebesar Rp. 1.500,00 per suara sah.” dan dijelaskan pula di ayat 5 bahwa alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun

berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

Dalam Permendagri No 36 Tahun 2018 juga menyatakan bahwa tujuan pemerintah akan adanya anggaran dana APBD untuk partai politik yaitu untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat. Oleh karena itu wajar jika pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban atas dana tersebut. Dan partai politik wajib melaporkan laporan setiap satu tahun sekali kepada Bupati.

Menurut Wijaya (2003) dalam Kholmi (2013) Sebagai sebuah organisasi modern, partai politik dituntut untuk mengembangkan etika politik yang berdiri di atas nilai-nilai akuntabilitas dan menciptakan sistem *feedback* antara partai dan konstituen untuk mempermudah tututan akuntabilitas publik yang akan melahirkan kemudahan komunikasi dan partisipasi konstituen terhadap semua kebijakan partai politik tersebut. Terwujudnya akuntabilitas keuangan partai politik merupakan bagian yang strategis dalam meminimalisir tuduhan akan adanya praktik-praktik politik uang. Akuntabilitas juga merupakan langkah awal dalam mewujudkan *good governance* pada partai politik (Kholmi, 2013).

## **2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan**

Penelitian terdahulu merupakan sebuah referensi guna mengembangkan ide gagasan yang akan digunakan untuk menyusun rumusan masalah dan hipotesis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

Variabel	Penelitian, Metode dan Sampel	Hasil Penelitian	Saran Penelitian
Persepsi Konstituen terhadap Akuntabilitas keuangan partai politik	Masiyah Kholmi (2013), Persepsi konstituen terhadap akuntabilitas keuangan partai politik (Studi di Kota Malang). Metode Kuantitatif analisis deskripsi, sampel konstituen partai politik di 34 partai politik.	1) Akuntabilitas keuangan partai politik mengenai pelaporan keuangan tahunan dan dana kampanye berada pada tingkat sedang dan rendah 2) Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan maka perlu dilakukan adanya penegakan hukum yang efektif, adanya peraturan jelas dari KPU atau pemerintah.	Hasil penelitian ini mungkin bias dikarenakan ketidaktahuan responden atau kurang memahami laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan partai politik. Jadi sasaran penelitian bisa dilakukan oleh orang yang paham keuangan partai politik.
Persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik	Ike Rachmawati (2013) Persepsi Akuntan Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik pada Kantor Akuntan Publik di Malang. Metode penelitian dengan menggunakan <i>opinion Research</i> . Sampel yaitu akuntan publik di Kota Malang yang melakukan audit terhadap laporan keuangan partai politik.	1) Tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik mengenai akuntabilitas keuangan partai politik 2) Tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik mengenai akuntabilitas laporan dana kampanye.	Untuk penelitian selanjutnya tidak hanya akuntan publik di Kota Malang, akan tetapi diperluas lagi di luar Kota Malang.
Persepsi mahasiswa terhadap pengaruh transparansi dan	Lailatur Rohmah (2014), Persepsi Mahasiswa UNESA tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik terhadap Kinerja Partai dan Upaya	1) Persepsi mahasiswa UNESA tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan partai	Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah

akuntabilitas keuangan partai politik terhadap kinerja partai dan upaya pemberantasan kerah putih.	Pemberantasan Kerah Putih. Metode penelitian dengan menggunakan metode deskriptif. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 342 mahasiswa Akuntansi S1 di Universitas Negeri Surabaya.	politik masih tergolong rendah serta hal ini berpengaruh terhadap kinerja partai politik dan kejahatan kerah putih di Indonesia yang susah diminimalisir. 2) Kurangnya pertanggungjawaban keuangan partai politik dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangannya yang menjadikan banyaknya kasus korupsi di Indonesia.	variabel dan sampel sehingga hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh lebih akurat dan mempunyai cakupan yang lebih luas.
Persepsi auditor terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik	Riska Arsianti (2015) Persepsi Auditor di Kota Malang terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik. Metode penelitian kualitatif. sampel auditor independen yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Malang.	1) Partai politik belum mampu melaporkan mengenai sumbangan dana kampanye dengan baik ke KPU. 2) mengenai transparansi laporan keuangan partai politik sudah dapat diakses oleh publik.	Untuk penelitian selanjutnya ditambah sampel dan diperluas wilayah penelitiannya, serta untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperoleh responden yang berpengalaman dalam partai politik sehingga tidak bias.
Persepsi pengurus partai terhadap akuntabilitas laporan	Masiyah Kholmi (2013), Persepsi Pengurus Partai Politik terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Partai Politik. Metode dengan	Menurut persepsi pengurus partai, partai telah memenuhi kriteria akuntabilitas	Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan

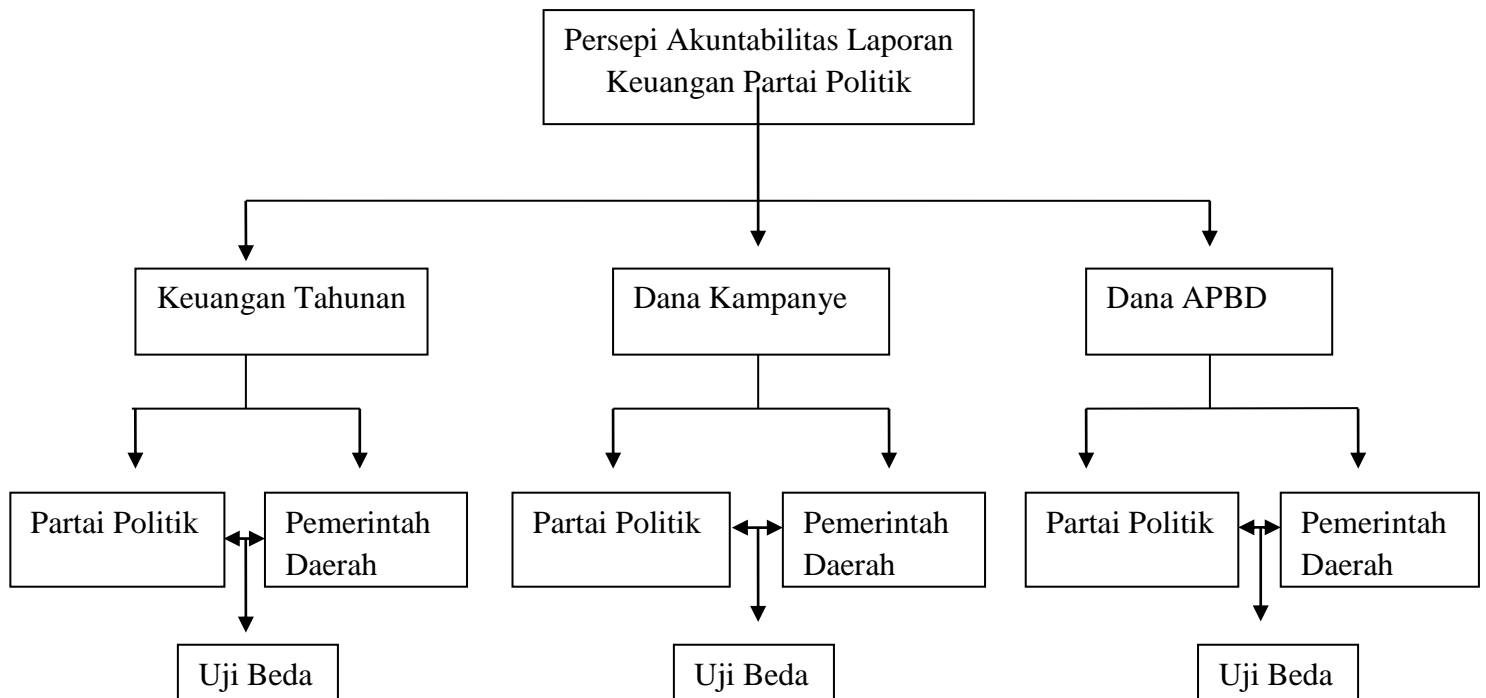


keuangan partai politik	kuantitatif analisis, sampel yang digunakan yaitu 7 Partai besar yan berada di Kota Malang.	pelaporan keuangan dana kampanye, serta mereka memiiki pendapat yang sama untuk menerapkan kategori akuntabilitas keuangan, yaitu akuntabilitas keuangan tahunan, kuntabilitas dana kampanye dan akuntabilitas dana APBD.	lagi dengan melihat persepsi dari berbagai kalangan, misalnya dari penyumbang dana, konsttuen, pemerintah, dan KPUD.
Persepsi warga negara terhadap akuntabilitas demokrasi keuangan partai politik	Jason Ross Arnold (2012), <i>Political Awareness Corruption perception and democratic accountability in Latin America</i> . Metode penelitian dengan menggunakan	Terdapat perbedaan persepsi antara kelompok berdasarkan pengetahuan politik, persepsi warga negara tersebut dibentuk oleh kesadaran politik yang diukur dengan indeks pengetahuan politik.	

### 2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang persepsi antara anggota partai politik dengan pemerintah daerah. Dimana akan digambarkan dengan persepsi anggota partai politik sebagai variabel independen (X), sedangkan untuk Akuntabilitas Laporan Keuangan Partai Politik sebagai variabel dependen (Y). Gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Keuangan Tahunan

Pelaporan terkait dengan keuangan partai politik merupakan suatu keharusan bagi partai, karena telah diatur oleh pemerintah, tentunya sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk membiayai partai. Pasal 1 (ayat 5) Undang- semua hak kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.

Dalam Pasal 39 Nomor 2 Tahun 2011 juga telah dijelaskan terkait dengan pengelolaan keuangan partai politik, antara lain:

- (1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diaudit oleh akuntan publik setiap 1 tahun dan diumumkan secara periodik.
- (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran Partai Politik;
  - b. laporan neraca, dan
  - c. laporan arus kas.

Dalam PSAK No. 45, tujuan utama laporan keuangan yaitu berguna untuk menyediakan informasi yang relevan untuk kepentingan para penyumbang dana, anggota organisasi, kreditor serta pihak lain yang menyediakan sumber dana bagi organisasi nirlaba. Oleh karena itu, indikator akuntabilitas keuangan organisasi partai politik merupakan suatu keniscayaan bagi keberlangsungan kehidupan partai yang membutuhkan dana yang tidak sedikit (Kholmi, 2013).

Penelitian Kholmi (2013), terkait persepsi pengurus partai terhadap akuntabilitas keuangan partai politik. Indikator tentang akuntabilitas keuangan tahunan menyatakan bahwa pengurus partai mayoritas menjawab sangat setuju sebanyak 55,01%, dengan pernyataan ini, maka pengurus partai menyatakan bahwa indikator keuangan tahunan sangat diperlukan organisasi partai politik. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arsianti (2015), menyatakan bahwa terkait dengan akuntabilitas laporan keuangan partai politik maka auditor di Malang menyatakan setuju, partai politik mematuhi peraturan yang berlaku

dalam PSAK No.45. Sedangkan di penelitian Kholmi (2010) tentang indikator keuangan tahunan partai politik menyatakan rata-rata atau rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dengan hipotesis

H1 : Terdapat perbedaan persepsi antara pengurus partai dan pemerintah daerah tentang akuntabilitas keuangan tahunan partai politik.

#### **2.4.2 Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Dana Kampanye**

Pelaporan dana kampanye selain mengacu pada PSAK No.45, juga mengacu pada PKPU No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Dimana Tanggung Jawab dana kampanye berada di tangan pasangan calon, sdangan untuk laporannya brada di tangan tim kampanye. Tuntutan akuntabilitas terkait laporan dana kampanye sangat diperlukan, yakni sebagai pertanggungjawaban atas dana dari perseorangan ataupun badan hukum swasta.

Menurut penelitin Kholmi (2010), terkait dengan indikator dana kampanye menyatakan bahwa setuju dengan indikator tersebut. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2013), menurut Akuntan Publik di Malang terkait akuntabilitas dana kampanye mereka menyatakan sangat setuju. Berbeda dengan penelitian Kholmi (2013), menyatakan bahwa indikator dana kampanye dalam kategori sedang atau rata-rata dan rendah. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka dapat dinyatakan dengan hipotesis:

H2 : Terdapat perbedaan antara anggota partai politik dan pemerintah daerah tentang akuntabilitas dana kampanye.

#### **2.4.3 Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Dana APBD/APBN**

Dana atau sumbangan yang berasal dari APBD/APBN yang telah digunakan untuk membiayai operasional partai politik dalam pelaporannya telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011, dalam Pasal 34A yang intinya yaitu bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berasal dari dana APBD/APBN yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Penelitian Kholmi (2013) menyatakan bahwa pengurus partai sangat setuju dengan adanya indikator akuntabilitas dari dana APBD. Sangat setuju disini menyatakan bahwa telah sesuai dengan pelaporan yang dilakukan partai. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2013) menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai.

Dengan adanya pernyataan di atas maka dapat disimpulkan hasil hipotesis, yaitu :

H3 : terdapat perbedaan persepsi antara pengurus partai politik dengan pemerintah daerah tentang akuntabilitas dana APBD/APBN.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Kabupaten Boyolali. Populasi dari penelitian ini adalah anggota partai politik yang dimana partai tersebut mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Boyolali dan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali. Untuk waktu penelitian, yaitu dari Februari sampai dengan selesai.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Yang diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017).

#### **3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

##### **3.3.1. Populasi**

Populasi adalah kelompok keseluruhan orang, peristiwa, atau sesuatu yang ingin diselidiki oleh peneliti (Sularso, 2003). Menurut Sugiyono (2017) Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda lain yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, populasi penelitian yaitu Pemerintah Daerah dan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Boyolali. Terdapat 5 partai politik, yaitu:

1. PDI
2. Golkar
3. PKS
4. PKB
5. Gerindra

Akan tetapi untuk partai Gerindra menyatakan bahwa dirinya sedang dalam transisi reformasi pengurus. Pengurus dan kantor sekretariat untuk sementara waktu berstatus sebagai demisioner, sehingga untuk saat ini belum bisa diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini hanya mengambil 4 partai saja, yaitu PDI, Golkar, PKS, dan PKB.

### 3.3.2. Sampel

Sampel adalah beberapa anggota atau bagian yang dipilih dari populasi (Sularso, 2003). Sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian seharusnya dipilih dengan representatif atau mampu mewakili, karena jika tidak maka ibarat empat orang yang ditutup matanya dan disuruh untuk menyimpulkan karakteristik gajah (Sugiyono, 2017).

Kriteria pengambilan sampel, sebagai berikut.

1. Pengurus partai politik, terdiri dari:
  - a. Ketua Partai Politik
  - b. Bendahara Partai Politik

- c. Anggota Partai Politik tingkat II, yang berada pada lembaga DPRD, karena anggota partai tersebut memiliki kewajiban dalam melaporkan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari dana pribadi pada saat pemilihan umum.

2. Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Bagian penganggaran di Badan Keuangan Daerah (BKD), sebanyak 9 orang.
- b. Bagian penerimaan laporan keuangan partai politik di Kantor Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol), sebanyak 6 orang.

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017), sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk anggota partai politik, maka dipilih anggota yang paham dengan pelaporan keuangan partai politik.

Terdapat lima partai politik, yaitu Partai PDI, Golkar, Gerindra, PKS, dan PKB. Lima partai tersebut merupakan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Boyolali. Sedangkan untuk pemerintah daerah ditujukan kepada Badan Keuangan Daerah, khususnya kepada bagian penganggaran dan anggota kesbangpol.



### **3.4 Data dan Sumber Data**

#### **3.4.1. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari responden yang telah dipilih pada sasaran penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada responden terpilih yang berisikan pertanyaan tentang variabel-variabel penelitian.

#### **3.4.2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, misalnya penelitian terdahulu dari jurnal-jurnal, berita dan lainnya.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.5.1 Kuesioner**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan yang digunakan yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada anggota partai politik dan pemerintah daerah di Kabupaten Boyolali. Untuk pemberian skor pada kuesioner ini menggunakan *skalalikert*, yaitu memberikan penilaian atas jawaban responden dengan identifikasi. Menurut Sugiyono (2017), *skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Dalam Skala Likert ini ketentuan penilaiannya, yaitu:

1. Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor 4.
2. Jawaban S (Setuju) diberi skor 3.
3. Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi skor 2.
4. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1.

### 3.5.2 Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpuln data untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian, meliputi jurnal penelitian, buku-buku, surat kabar, serta berita online.

### 3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentnag hal tersebut yang kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan variabel akuntabilitas keuangan partai politik. Akuntabilitas keuangan tersebut diukur dari laporan keuangan dana kampanye, yang bersumber dari kegiatan kampanye untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 dan pelaporan sumber dana yang berasal dari dana APBN atau APBD.

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini berdasarkan teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.2  
Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Konsep Variabel	Pengukuran
Akuntablitas Keuangan Tahunan	Partai Politik diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangannya. seperti yang dijelaskan dlam pasal 1 (ayat 5) UU RI No. 2 Tahun 2011 dan menurut IAI	Menggunakan skala Likert dengan skor 1,2,3, dan 4. 1 : Sangat Tidak Setuju 2 : Tidak Setuju 3 : Setuju

	(2009) dalam PSAK No.45. Oleh karena itu indikator akuntabilitas organisasi partai politik merupakan keniscayaan bagi keberlangsungan kehidupan partai yang telah banyak menggunakan dana publik. (Kholmi, 2008)	4 : Sangat Setuju  Terdapat 10 item pertanyaan dengan mengadopsi dari penelitian Kholmi (2013).
Akuntabilitas Keuangan Dana Kampanye	Tanggung jawab dana kampanye berada di tangan pasangan calon, sedangkan tanggung jawab atas laporan dana kampanye berada di tangan tim kampanye pasangan calon atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye atau LPPDK. LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon dan tim kampanye kepada KPU Provinsi atau Kabupaten dan di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/Kabupaten (Kholmi, 2008).	Menggunakan skala Likert dengan skor 1,2,3, dan 4. 1 : Sangat Tidak Setuju 2 : Tidak Setuju 3 : Setuju 4 : Sangat Setuju Terdapat 12 item pertanyaan dengan mengadopsi dari penelitian Kholmi (2013).
Akuntabilitas Keuangan dari Dana APBD	Pelaporan keuangan Dana APBD untuk partai politik diatur dalam UU No.2 Tahun 2011, khususnya di pasal 34A, dimana yang berisi tentang partai politik harus melaporkan terkait tentang penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana APBD serta di audit oleh BPK secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit paling lambat setelah tahun anggaran berakhir (Kholmi, 2008).	Menggunakan skala Likert dengan skor 1,2,3, dan 4. 1 : Sangat Tidak Setuju 2 : Tidak Setuju 3 : Setuju 4 : Sangat Setuju  Terdapat 8 item pertanyaan dengan mengadopsi dari penelitian Kholmi (2013).

### 3.8 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2017) “instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Instrumen yang digunakan yaitu dengan kuesioner metode tertutup, dimana kemungkinan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan alternatif jawaban.
2. Indikator-indikator untuk variabel dijabarkan penulis menjadi sejumlah pertanyaan sehingga diperoleh data kualitatif. Kemudian data tersebut akan diubah menjadi bentuk kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik.

Teknik pemberian skor dalam penelitian ini menggunakan teknik *skala Likert*. Menurut Sugiyono (2017), *skala Likert* dalam penelitian digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dalam mengukur data, Penelitian ini menggunakan variabel akuntabilitas keuangan partai politik diukur dari pelaporan keuangan dana kampanye parpol, yaitu pelaporan dana kegiatan kampanye untuk pemilihan legislatif dan pilihan presiden 2019 dan pelaporan keuangan tahunan parpol, yaitu pelaporan danayang bersumber dari dana APBN dan APBD. Masing-masing variabel diukur dengan model *skala likert* yaitu mengukur pelaporan keuangan

dengan menyatakan dalam kategori sangat rendah atau tinggi terhadap pertanyaan yang diajukan dengan dengan skor 1, 2, 3, dan 4.

### **3.9 Uji Instrumen Penelitian**

#### **3.9.1 Uji Kualitas Data**

Uji Kualitas data dilakukan untuk memperoleh kepastian dari setiap instrumen apakah sudah tepat atau tidak untuk menunjukkan tingkat kepastian sesuai dengan keadaan yang terjadi. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan data dan keandalan data. Dalam hal ini pengujian kualitas data dapat digunakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

#### **3.9.2 Uji Validitas**

Menurut Sularso (2003), Suatu instrumen dikatakan valid jika memiliki kemampuan mengukur apa yang seharusnya diukur. dengan menggunakan pengukuran validitas ini, maka untuk menentukan pengukuran yang valid. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid (Sugiyono, 2017). Adapun kriteria pengujian validitas yaitu, apabila  $p\text{-value} < 0,05$ , maka pengukuran tersebut adalah valid dan sebaliknya jika  $p\text{-value} > 0,05$  maka pengukuran tersebut tidak valid.

#### **3.9.3 Uji Reliabilitas**

Reliabilitas merupakan konsistensi dan stabilitas suatu skor dari suatu instrumen pengukur (Sularso, 2003). Hasil pengujian reliabilitas dari variabel-variabel penelitian menggunakan Cronbach's alpha dengan menggunakan bantuan program SPSS.

### **3.10 Teknik Analisis Data**

### 3.10.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan salah satu persyaratan dalam analisis data, dimana uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang akan diuji tersebut normal atau tidak. Menurut Nurhasanah (2016), dari sekian banyak metode yang dapat digunakan untuk membuktikan normalitas sebuah data, maka satu cara yang sering digunakan yaitu dengan *Kolmogorov-Smirnov*. Penelitian ini menggunakan *one sample Kolmogorov-Smirnov test* untuk mengetahui normalitas data yang akan diolah. Jika  $\text{Sig} > \alpha$ , maka data tersebut berdistribusi normal sedangkan jika  $\text{Sig} < \alpha$ , maka data berdistribusi tidak normal.

### 3.10.2 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu dengan menggunakan statistik parametrik dan statistik nonparametrik. Statistik parametrik dilakukan dengan menggunakan suatu asumsi khusus yaitu distribusi data menunjukkan data yang normal, sebaliknya statistik nonparametrik tidak terdapat asumsi khusus sehingga data yang digunakan adalah data yang tidak normal.

#### 3.7.2.1 Independent Sample t-Test (Uji t)

Uji t dua sampel (*Independent sample t-Test*) digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok yang tidak berhubungan (Ghozali, 2016). Perbedaan nilai rata-rata dua kelompok dibandingkan dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua kelompok tersebut.

Adapun tahapan yang harus dilakukan yaitu: (1) menguji *variance* populasi kedua kelompok apakah sama atau berbeda dengan nilai *levene's test*. jika nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka *variance* kedua kelompok sama. Sedangkan jika nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka *variance* kelompok berbeda. (2) melihat nilai *t-test* untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata kedua kelompok. Jika nilai *t-test*  $< 0,05$ , maka terdapat perbedaan nilai rata-rata, sedangkan jika nilai *t-test*  $> 0,05$ , maka tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata (Ghozali, 2016).

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Penelitian**

Subjek peneliian adalah subjek yang akan dilakukan penelitian, sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang akan dilakukan penelitian (Anshori dan Iswanti, 2009). Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. Sedangkan Objek penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Akuntabilitas dari Laporan Keuangan Tahunan, Akuntabilitas Dana Kampanye dan Akuntabilitas Dana APBD.

##### **4.1.1 Partai Politik Kabupaten Boyolali**

Partai Politik di Kota Boyolali berjumlah 13 Partai Politik yang terdaftar di KPU yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Garuda, PSI, Perindo.



Tabel 4.1  
Perolehan Kursi DPRD Pemilu 2019 Kabupaten Boyolali

No.	Partai Politik	Kursi
1.	PKS	3
2.	PKB	2
3.	PDIP	35
4.	Partai Golkar	4
5.	Partai Gerindra	1
6.	Partai Demokrat	0
7.	Partai Nasdem	0
8.	PBB	0
9.	PAN	0
10.	PPP	0
11.	Partaui Garuda	0
12.	PSI	0
13.	Perindo	0
	Jumlah	45

Sumber: kpu-boyolali.go.id

Berdasarkan tabel di atas, partai politik yang mampu menduduki kursi DPRD terdapat 5 partai politik yaitu PDIP mendapatkan 35 kursi, Partai Golkar mendapatkan 4 kursi, PKS mendapatkan 3 kursi, PKB mendapatkan 2 kursi, Partai Gerindra mendapatkan 1 kursi.

#### **4.1.2 Profil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dan Peraturan Bupati Boyolali No. 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Boyolali, terdiri dari:

1. Kepala.
2. Sekretariat
3. Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4. Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lain-Lain
5. Bidang Anggaran
6. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
7. Bidang Pengelolaan dan Pembiayaan Aset Daerah
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. UPTD.

**a. Visi**

"Terwujudnya pengelolaan Pendapatan, keuangan dan asset daerah yang professional, transparan dan akuntabel"

**b. Misi**

Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan efektivitas sumber pendapatan daerah.
- 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelola keuangan dan aset daerah.

- 3) Menerapkan sistem pengelolaan barang milik daerah dan penilaian asset sesuai SAP secara efektif dan transparan.
- 4) Memantapkan koordinasi perencanaan anggaran dan menjamin likuiditas anggaran daerah

**c. Tugas pokok**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**d. Fungsi**

- 1) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Pengorganisasian dan perencanaan dalam upaya Pengelolaan, Pendapatan Akuntansi dan Perbendaharaan serta Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah.

## **4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data**

### **4.2.1 Deskripsi Kuesioner**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan kuesioner. Objek penelitian adalah Pengurus dan Anggota partai politik di empat (empat) partai politik yang mempunyai kedudukan di DPRD, serta di Kesbangpol dan BKD untuk mewakili pemerintah daerah. Berikut penyebaran kuesioner penelitian ini, yaitu :

Tabel 4.2  
Daftar Responden Penelitian

No	Nama	Penyebaran	Pengembalian
1	Partai Politik	40	30
2	Pemerintah Daerah	10	5
	Total	50	35

Sumber: data diolah, 2020

Tabel diatas menjelaskan bahwa kuesioner yang disebarkan sebanyak 50 kuesioner dan kembali sebanyak 35 kuesioner. Partai politik mengembalikan 33 kuesioner dan rusak sebanyak 3 kuesioner. Sedangkan Pemerintah daerah Kesbangpol mengembalikan 2 kuesioner dari 5 kuesioner yang diberikan dan BKD mengembalikan 3 kuesioner dari 5 kuesioner yang diberikan juga.

#### 4.2.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Dalam deskripsi ini memberikan tambahan informasi terkait data responden yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun tabel-tabel dibawah ini menjelaskan terkait pendidikan terakhir, lama bekerja, dan jabatan responden

Tabel 4.3  
Pendidikan Terakhir Partai Politik

Tingkat Pendidikan	Partai Politik		Pemerintah Daerah	
	Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
SD	2	6,7%	0	0%
SMA	20	66,7%	0	0%
D3	1	3,3%	0	0%
S1	2	6,7%	5	100%
S2	5	16,7%	0	0%
Jumlah	30	100%	5	100%

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan tabel di atas, responden partai politik paling banyak SMA sebesar 66,7%, dan paling sedikit adalah D3 sebesar 3,3%. Sedangkan untuk pemerintah daerah semua responden adalah lulusan S1 sebesar 100%.

Tabel 4.4  
Lama Bekerja Partai Politik

Partai Politik			Pemerintah Daerah		
Masa Kerja	Frekuensi	Presentase	Masa Kerja	Frekuensi	Prosentase
5	12	40%	6	2	40%
10	5	16,7%	10	1	20%
15	5	16,7%	12	1	20%
19	2	6,7%	14	1	20%
20	2	6,7%	-	-	-
21	3	10,0%	-	-	-
27	1	3,3%	-	-	-
Jumlah	30	100%	Jumlah	5	100%

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, responden pada partai politik sebagian besar memiliki pengalaman kerja 5 tahun sebesar 40% dan paling sedikit 27 tahun sebesar 3,3%. Sedangkan untuk pemerintah daerah paling banyak memiliki pengalaman kerja 6 tahun sebesar 40% dan yang lain adalah sama sebesar 20% untuk masa kerja 10, 12, dan 14 tahun.

Tabel 4.6  
Jabatan Partai Politik

Partai Politik			Pemerintah Daerah		
Jabatan	Frekuensi	Presentase	Jabatan	Frekuensi	Prosentase
Anggota	16	53,2%	Ketua Bid.	2	40%
Pengurus	14	46,7%	Bid.Anggaran	3	60%
Jumlah	30	100%	Jumlah	5	100%

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden dari partai politik yang mengisi dari pihak anggota sebesar 53,2% dan dari pengurus sebesar 46,7%. Sedangkan untuk pemerintah daerah dari pihak ketua bidang sebesar 40% dan dari pihak bidang anggaran sebesar 60%.

### 4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1 Hasil Pengujian Instrumen

##### 4.3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang di ukur melaui item pertanyaan yang diajukan dalam penelitian tersebut. Uji validitas dengan melakuka korelasi antara skor item pertanyaan dengan skor total variabel. Nilai koefisien tertinggi menunjukan kuatnya item \tersebut untuk mengugkapkan sesuatu.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Item Akuntabilitas Keuangan Tahunan

No. Soal	Nilai Sig.	Taraf Siginifikan	Keterangan
1	0,000	0.05	Valid
2	0,000	0,05	Valid
3	0,022	0,05	Valid
4	0,000	0,05	Valid
5	0,000	0,05	Valid
6	0,000	0,05	Valid
7	0,000	0,05	Valid
8	0,000	0,05	Valid
9	0,000	0,05	Valid
10	0,000	0,05	Valid
11	0,000	0,05	Valid
12	0,000	0,05	Valid
13	0,000	0,05	Valid
14	0,000	0,05	Valid
15	0,000	0,05	Valid
16	0,000	0,05	Valid
17	0,000	0,05	Valid

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, item-item pertanyaan pada indikator Akuntabilitas Keuangan Tahunan Partai Politik memiliki nilai Sig. < taraf signifikan ( $\alpha$ ). Hasil uji dari 17 pertanyaan di atas telah memenuhi syarat validitas dan dapat digunakan untuk analisa selanjutnya.

Tabel 4.10  
Hasil Uji Validitas Item Akuntabilitas Dana Kampanye

No. Soal	Nilai Sig.	Taraf Siginifikan	Keterangan
1	0,000	0,05	Valid
2	0,000	0,05	Valid
3	0,000	0,05	Valid
4	0,000	0,05	Valid
5	0,000	0,05	Valid
6	0,000	0,05	Valid
7	0,000	0,05	Valid
8	0,000	0,05	Valid
9	0,000	0,05	Valid
10	0,000	0,05	Valid
11	0,000	0,05	Valid
12	0,000	0,05	Valid
13	0,000	0,05	Valid
14	0,000	0,05	Valid

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, item-item pertanyaan pada indikator Akuntabilitas Dana Kampanye memiliki nilai Sig. < taraf signifikan ( $\alpha$ ). Hasil uji dari 14 pertanyaan di atas telah memenuhi syarat validitas dan dapat digunakan untuk analisa selanjutnya.

Tabel 4.11  
Hasil Uji Validitas Item Dana APBD

No. Soal	Nilai Sig.	Taraf Signifikan	Keterangan
1	0,000	0,05	Valid
2	0,000	0,05	Valid
3	0,000	0,05	Valid
4	0,000	0,05	Valid
5	0,000	0,05	Valid
6	0,000	0,05	Valid
7	0,000	0,05	Valid

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, item-item pertanyaan pada indikator Akuntabilitas Dana APBD memiliki nilai Sig. < taraf signifikan ( $\alpha$ ). Hasil uji dari 7 pertanyaan di atas telah memenuhi syarat validitas dan dapat digunakan untuk analisa selanjutnya.

#### 4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan sebuah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa mana suatu alat ukur tersebut dapat dipercaya. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha*. Dapat dikatakan reliabel jika suatu instrumen tersebut memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha* > 0,7.

Tabel 4.12  
Hasil Uji Reliabilitas

Item Pertanyaan	Cronbach Alpha	Syarat Nilai	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan Tahunan	0,935	0,7	Reliabel
Akuntabilitas Dana Kampanye	0,949	0,7	Reliabel
Akuntabilitas Dana APBD	0,913	0,7	Reliabel

Sumber : data diolah, 2020



Berdasarkan tabel di atas, hasil uji reliabilitas pada variabel-variabel penelitian ini memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha*  $> 0,7$ . Hal ini menunjukkan bahwa item masing-masing variabel dapat dikatakan reliabel atau dapat dipercaya untuk mengukur terkait Akuntabilitas dalam penelitian ini.

#### 4.3.1.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujian menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Sminorv Test*. Data tersebut akan berdistribusi normal jika Asym Sig.  $< 0,05$ .

Tabel 4.13  
Hasil Uji Normalitas

Item Pertanyaan	Asym. Sig	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan Tahunan	0,589	Normal
Akuntabilitas Dana Kampanye	0,545	Normal
Akuntabilitas Dana APBD	0,088	Normal

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan Hasil uji di atas, Akuntabilitas Keuangan Tahunan memiliki nilai Asym Sig.  $0,589 > 0,05$  sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal. Variabel Akuntabilitas Dana Kampanye memiliki nilai Asym Sig.  $0,545 > 0,05$  sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal. Dan untuk variabel Akuntabilitas Dana APBD memiliki nilai Asym Sig.  $0,088 > 0,05$  sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal.

#### 4.3.2 Pengujian Hipotesis

##### 4.3.2.1 Pengujian Hipotesis 1 (satu) Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Keuangan Tahunan

Pengujian pada hipotesis satu ini karena berdistribusi normal maka menggunakan uji *Independent Sample T-test*. Pengujian ini menggunakan 35 kuesioner, data tidak berpasangan.

Tabel 4.14  
Hasil Independent Sample T-test

Variabel	Kelompok	Mean	Levene's Test		T-test Sig.
			F	Sig.	
Keuangan Tahunan	Partai Politik	59,13	1,456	0,236	0,000
	Pemerintah Daerah	44,80			0,001

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan uji di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengetahuan partai politik lebih tinggi daripada pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai *mean* yang didapatkan, yaitu partai politik 59,13, sedangkan untuk pemerintah daerah mendapatkan nilai 44,80. Berdasarkan nilai *Levene's test* (F) sebesar 1,456 dengan probabilitas (Sig.) sebesar 0,236. Nilai menunjukkan lebih dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa *variance* kedua sampel adalah sama.

Dalam Hipotesis 1 (satu) memiliki nilai Sig. perbedaan rata-rata sebesar 0,000. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai Sig. lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  jadi Sig. Keuangan Tahunan = 0,000 < nilai  $\alpha = 0,05$ . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara partai politik dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji rata-rata Independent Sample T-test dapat diketahui bahwa rata-rata persepsi terkait akuntabilitas keuangan tahunan partai politik lebih tinggi dari pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa di dalam hipotesis 1 (satu) terdapat perbedaan yang signifikan antara partai politik dan pemerintah daerah terkait dengan akuntabilitas keuangan tahunan partai.

#### 4.3.2.2 Pengujian Hipotesis 2 (dua) Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Dana Kampanye

Tabel 4.15  
Hasil *Independent Sample T-test*

Variabel	Kelompok	Mean	Levene's Test		T-test Sig.
			F	Sig.	
Dana Kampanye	Partai Politik	49,90	0,720	0,402	0,000
	Pemerintah Daerah	36,40			0,002

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan uji di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengetahuan partai politik lebih tinggi daripada pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai *mean* yang didapatkan, yaitu partai politik 49,90, sedangkan untuk pemerintah daerah mendapatkan nilai 36,40. Berdasarkan nilai *levene's test* (F) sebesar 0,720 dengan probabilitas (Sig.) sebesar 0,402. Nilai menunjukkan lebih dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa *variance* kedua sampel adalah sama.

Dalam Hipotesis 1 (satu) memiliki nilai Sig. perbedaan rata-rata sebesar 0,000. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai Sig. lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  jadi Sig. Dana Kampanye = 0,000 < nilai  $\alpha = 0,05$ . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara partai politik dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji rata-rata *Independent Sample T-test* dapat diketahui bahwa rata-rata persepsi terkait akuntabilitas dana kampanye lebih tinggi dari pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa di dalam hipotesis 2 (dua) terdapat perbedaan yang signifikan antara partai politik dan pemerintah daerah terkait dengan akuntabilitas dana kampanye.

#### 4.3.2.3 Pengujian Hipotesis3 (tiga)Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Dana APBD

Tabel 4.16  
Hasil *Independent Sample T-test*

Variabel	Kelompok	Mean	Levene's Test		T-test Sig.
			F	Sig.	
Dana APBD	Partai Politik	25,37	1,040	0,315	0,000
	Pemerintah Daerah	17,80			0,001

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan uji di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengetahuan partai politik lebih tinggi daripada pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai *mean* yang didapatkan, yaitu partai politik 25,37, sedangkan untuk pemerintah daerah mendapatkan nilai 17,80. Berdasarkan nilai *levene's test* (F) sebesar 1,040 dengan probabilitas (Sig.) sebesar 0,315. Nilai menunjukkan lebih dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa *variance* kedua sampel adalah sama. Dalam Hipotesis 3 (Tiga) memiliki nilai Sig. perbedaan rata-rata sebesar 0,000. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai Sig. lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  jadi Sig. Keuangan Tahunan = 0,000 < nilai  $\alpha = 0,05$ . Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara partai politik dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji rata-rata *Independent Sample T-test* dapat diketahui bahwa rata-rata persepsi terkait akuntabilitas dana APBD partai politik lebih tinggi dari pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa di dalam hipotesis 3 (Tiga) terdapat perbedaan yang signifikan antara partai politik dan pemerintah daerah terkait dengan akuntabilitas keuangan tahunan partai.

#### **4.4 Pembahasan Hipotesis**

##### **4.4.1 Hipotesis Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Keuangan Tahunan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara akuntabilitas keuangan tahunan partai politik dan akuntabilitas keuangan tahunan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai *mean* yang didapatkan, yaitu partai politik 59,13, sedangkan untuk pemerintah daerah mendapatkan nilai 44,80. Berdasarkan nilai *Levene's test (F)* sebesar 1,456 dengan probabilitas (*Sig.*) sebesar 0,236.

Terdapat perbedaan persepsi antara kedua kelompok tersebut dikarenakan pengetahuan politik (Arnold, 2012). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi anggota partai politik lebih positif dibandingkan dengan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pelaporan keuangan tahunan partai politik hanya digunakan untuk pihak *intern* partai. Setiap partai politik memiliki AD/ART tersendiri, sehingga pelaporan untuk laporan keuangan tahunan partai politik hanya dilaporkan kepada pengurus partai pusat. Sedangkan untuk pelaporan

kepada pemerintah, partai politik hanya diwajibkan melapor terkait dana APBD dan dana kampanye.

Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2016) yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan persepsi terkait akuntabilitas keuangan partai politik.

#### **4.4.2 Hipotesis Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Dana Kampanye**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara akuntabilitas dana kampanye partai politik dan akuntabilitas dana kampanye pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai *mean* yang didapatkan, yaitu partai politik 49,90, sedangkan untuk pemerintah daerah mendapatkan nilai 36,40. Berdasarkan nilai *Levene's test* (F) sebesar 0,720 dengan probabilitas (Sig.)

Persepsi anggota partai politik dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa anggota partai politik lebih positif daripada pemerintah daerah. Rata-rata anggota partai politik memiliki persepsi yang tinggi pada semua item pertanyaan. Akan tetapi berbeda dengan pemerintah daerah yang menyatakan lebih rendah pada item penyerahan laporan dana kampanye telah diserahkan kepada kantor akuntan publik sebelum 60 hari setelah pemungutan suara.

Menurut Arsianti (2015), mengenai akuntabilitas dana kampanye menunjukkan bahwa partai politik belum memiliki karakteristik melaporkan sumbangan dana kampanye dalam bentuk barang dan jasa ke KPU dengan baik. Hal ini menurut partai politik memiliki persepsi yang tinggi sedangkan untuk

pemerintah daerah memiliki persepsi yang rendah. Temuan ini mendukung hasil penelitian Darmoko dan Djuwitawati (2014) yang membuktikan adanya perbedaan persepsi antara partai politik dan pemerintah daerah yang diwakili oleh KPU terkait akuntabilitas dana kampanye.

#### **4.4.3 Hipotesis Persepsi Antara Anggota Partai Politik dengan Pemerintah Daerah tentang Akuntabilitas Dana APBD**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara akuntabilitas keuangan tahunan partai politik dan akuntabilitas keuangan tahunan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai *mean* yang didapatkan, yaitu partai politik 25,37, sedangkan untuk pemerintah daerah mendapatkan nilai 17,80. Berdasarkan nilai *levene's test* (F) sebesar 1,040 dengan probabilitas (Sig.) sebesar 0,315.

Ketidaktahuan terkait partai politik menjadikan perbedaan persepsi di antara partai politik dan pihak eksternal (Arnold, 2011). Persepsi antara partai politik dengan pemerintah daerah terhadap dana APBD menunjukkan bahwa partai politik lebih positif dibandingkan dengan pemerintah daerah. Menurut Permendagri No. 36 Tahun 2018, dana APBD merupakan salah satu sumber dana partai politik. Pemberian dana tersebut sesuai dengan hasil suara yang diperoleh partai politik. Dalam pengurusan dana APBD ini diserahkan oleh Kesbangpol dan akan diaudit oleh BPK.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mufazzal dan Abidin (2017), menyatakan bahwa sebagian partai politik melaporkan dana APBD mengacu pada permendagri dan juga pada akuntansi. Dalam penelitian ini semua partai politik telah melaporkan sesuai dengan peraturan yang ada. Partai politik juga menunjukkan persepsi tinggi pada semua item pertanyaan. Akan tetapi terdapat beberapa persepsi pemerintah yang menunjukkan sedang persepsinya. Sehingga menyebabkan perbedaan terhadap persepsi keduanya. Temuan ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholmi (2010) dan Kholmi (2013) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi terkait akuntabilitas dana APBD.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan pada partai politik sudah terlaksana akan tetapi untuk variabel keuangan tahunan partai politik tidak dapat dilihat oleh pihak *ekstern*, sehingga pihak *ekstern* kurang begitu mengerti laporan keuangan tahunan partai politik. Oleh karena itu, menyebabkan adanya perbedaan persepsi antara partai politik dan pemerintah daerah terkait laporan keuangan tahunan.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan persepsi antara partai politik dengan pemerintah daerah terkait dana kampanye dan APBD yaitu terdapat beberapa item pertanyaan yang berbeda persepsi antara keduanya. Sehingga masih terdapat persepsi sedang oleh pemerintah daerah. Hal ini juga dikarenakan kurangnya responden dalam pemerintah daerah sehingga kurang sepadan dengan responden oleh partai politik, oleh karena itu menjadikan perbedaan persepsi antara partai dan pemerintah daerah dalam semua variabel.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Responden di Pemerintah Daerah yang mengetahui secara pasti terkait akuntabilitas keuangan partai politik terbatas. Sehingga sebatas 5 orang saja di bagian anggaran daerah yang mengetahui terkait akuntabilitas keuangan politik tersebut.
2. Keadaan yang kurang mendukung, menjadi faktor tersebar kendala dalam penyebaran kuesioner . Sehingga seadanya dan kurang teliti, sehingga penelitian kurang terprogram. Untuk wawancara yang dilakukan juga terbatas dikarenakan *sosial distancing*.

## 5.3 Saran

Saran-saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Menambah persepsi dari partai politik dengan menambah responden dari partai politik lainnya. Serta menambah di pihak pemerintah daerah seperti KPU yang mengetahui terkait dana kampanye.
2. Memperluas penelitian dari sudut pandang yang lain, seperti dari sudut pandang masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan partai politik tersebut, sehingga nantinya laporan keuangan partai politik lebih akuntabel dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. The theory of plenned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211
- Arnold, Jason Ross.2012.*Political awareness, corruption perceptions and democratic accountability in Latin America*. Jurnal Acta Politica Vol. 47, 1, 67–90 [www.palgrave-journals.com/ap/](http://www.palgrave-journals.com/ap/)
- Chairany, Permatasari, Nurhidayah dan Nurul U.D.2011. *Pandangan Pemilik Badan Usaha Islam Terhadap Akuntabilitas dan Moralitas*.Journal The Indonesian Accounting Review, July, Vol, 1, No. 2, hal. 135-144
- Darmoko, H. W., dan Djuwitawati, R.2014. *Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Persepsi Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Auditor Kantor Akuntan Publik*.
- Eisenhardt, K. M.1989. *Agency theory: An Assessment and review*. *Acamedy of management review*, 14(1), 57-74.
- Eko.Yusuf N.2015.*Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik yang Baik*. Jurnal Cakarawala Hukum, Vol.6, No 2 ISSN : 2356-4962.
- Ghozali, I.2016.*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 8*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://kpu-boyolali.go.id/berita-133/penetapan-penghitungan-kursi-dan-calon-terpilih.html> diakses 19 Sepetember 2020
- <http://bkd.boyolali.go.id/>
- <https://kpu-boyolali.go.id/>
- Himawan, K. A.2014. *Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik (Studi Kasus pada Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur)*. Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Husodo, A.T.2009. *Manipulasi Laporan Dana Kampanye*, <http://www.sumeks.co.id>. 18 November 2020, 13.20 WIB.
- ICW.(2018).*Outlook Korupsi Politik Indonesia 2018*. Indonesia CorruptionWatch.[https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook\\_korupsi\\_politik\\_2018\\_110118.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_korupsi_politik_2018_110118.pdf)
- J.B. Gharthey. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Jensen, M. C. dan W.H. Meckling.1976.*Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of FinancialEconomics, October, 3(4), 305-360.
- Kholmi, M.2010.*Persepsi Konstituen Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik (Studi di Kota Malang)*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 1(2).
- Kholmi, M.2013.*Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik*. Jurnal Reviu Akuntansidan KeuanganISSN: 2088-06853(1), April 2013.
- Kholmi, M. 2010. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik*. Ekonometrika-Bisnis, 1(2), 215-226.
- LAN (Lembaga Admistrasi Negara). 2005. Pedoman Penyusunan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Jakarta.
- Lukito. Penny. K. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo.2002.*Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Mufazzal & Zainal Abidin. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik dari APBA (Studi Kasus Lima Partai Politik Dominan di Parlemen Aceh Tahun Anggaran 2014)*. Jurnal Mahasiswa FISIP Unsyiah 2(2).
- Nurhasanah, Siti.2016.*Praktikum Statistik 2 untuk Ekonomi dan Bisnis, Aplikasi dengan Ms. Excel dan SPSS*. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum epublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- Purnomo, D. 2016. *Persepsi Users Atas Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pemerintah Provinsi SulawesiTengah)*. Jurnal Katalogis Volume 4 Nomor 6.

- Rachmawati, I.2013. *Persepsi Akuntan Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik pada Kantor Akuntan Publik di Malang*.El Muhasaba : Jurnal Akuntansi, 3(1)
- Ramadhan, Ardito.2019.*KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol SenilaiRp.8.461persuara*.<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasioan/read/2019/12/11/16055891/kpk-dan-lipi-usulkan-besaran-dana-parpol-senilai-rp-8461-per-suara?espv=1> diakses 25 Februari 2020 jam 07.30 WIB
- Rohmah, Lailatur.2011. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Unesa Tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Terhadap Kinerja Partai dan Upaya Pemberantasan Kejahatan Kerah Putih*.<http://ejournal.unesa.ac.id/jurnal/jurnalakuntansi/artikel/7078/persepsi-mahasiswa-akuntansi-unesa-tentang-pengaruh-transparansi-dan-akuntabilitas-keuangan-partai-politik-terhadap-kinerja-partai-dan-upaya-pemerantasan-kejahatan-kerah-putih>diakses 14 Oktober 2019
- Robbins, S.P., & Judge, T. A.2012. *Perilaku Organisasi* Edisi 12. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Buku 3. Bandung : Alfabeta
- Suhery, Muhammad, Honeyta L.P., dan Ilhamsyah, P.R. 2017.*Good Governance dan Loyalitas Anggota Partai Nasional dan Partai Lokal di Aceh*. Vol.1 No. 1. ISSN 2302-0199.
- Umami, Risyah & Idang Nurodin.2017.*Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Vol. 6 edisi 11 Oktober 2017.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Walgito, B.2005.*Pengantar Psikologi Umum*. Edisi Kelima. Yogyakarta : Penerbit : ANDI.
- Yulianto.2019.*Skor Pencegahan Korupsi Boyolali Tertinggi se-Indonesia*.<https://www.fokusjateng.com/2019/11/15/skor-pencegahan-korupsi-boyolali-tertinggi-se-indonesia/> . diakses tanggal17 Maret 2020, 22.31 WIB.

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1

**JADWAL PENELITIAN**


No	Bulan	September				Oktober				November				Januari				Februari			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X			X			X	X	X
2	Konsultasi							X	X				X				X		X	X	X
3	Revisi Proposal																				
4	Pengumpulan Data																				
5	Analisis Data																				
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																				
7	Pendaftaran Munasqasah																				
8	Munasqasah																				
9	Revisi Skripsi																				

No	Bulan	Juni				Agustus				September				Oktober				November			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																				
2	Konsultasi				X							X			X			X	X	X	
3	Revisi Proposal		X					X				X	X					X	X	X	
4	Pengumpulan Data																X	X			
5	Analisis Data																X	X	X	X	
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																		X	X	
7	Pendaftaran Munasqasah																			X	
8	Munasqasah																				
9	Revisi Skripsi																				

No	Bulan	Desember				Januari			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal								
2	Konsultasi								
3	Revisi Proposal								
4	Pengumpulan Data								
5	Analisis Data								
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi								
7	Pendaftaran Munaqasah								
8	Munaqasah				X				
9	Revisi Skripsi					X	X	X	



## Lampiran 2



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali  
 Jl. Merdeka Timur, Kariri, Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah  
 Telp. (0276) 321087 Fax. (0276) 321087, e-mail kantesbangpol@boyolali.go.id  
 Website: www.boyolali.go.id

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 NOMOR : 070/203/III/5.5/2020

I. **DASAR** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

II. **MEMBACA** : 1. Surat dari BP3D Kab. Boyolali, Nomor : 070/209/5.1/2020, tanggal 23 Maret 2020 Perihal : **Rekomendasi Teknis Penelitian.**  
 2. Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, Nomor : B-1232/In.10/F.IV.1/TL.00/03/2020, tanggal 13 Maret 2020, Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian.**

III. Prinsipnya **TIDAK** **KEBERATAN** / Dapat Menerima atas pelaksanaan Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Boyolali.

1. Nama / NIM : **ANIS MONIKA / 165221192**  
 2. Alamat : Gombang Alas RT 07 RW 05, Gombang, Cawas, Klaten  
 3. No. HP : 085526357832  
 4. Pekerjaan : Mahasiswa  
 5. Penanggung Jawab : Dr. Awan Kostrad Diharto, SE, MAg  
 6. Judul Kegiatan : **"PERSEPSI ANTARA ANGGGOTA PARTAI POLITIK DENGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BOYOLALI"**  
 7. Lokasi : BKD Kab. Boyolali, Kantor Kesbangpol Kab. Boyolali, dan DPC Partai : PDIP, Golkar, PKB, PKS, dan Gerindra Kab. Boyolali  
 8. Peserta : 1 orang.

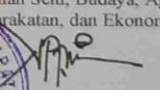
IV. Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan objek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Keterangan ini.
- Pelaksanaan Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
- Surat Keterangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Keterangan ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau objek Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat menolak untuk menerima Peserta Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat.
- Setelah Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.


V. Surat Keterangan Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat berlaku :

Berlaku : Dari tanggal : **23 Maret 2020** s/d tanggal : **23 Juni 2020**  
 Perpanjangan : Dari tanggal : s/d tanggal :

Dikeluarkan di : **BOYOLALI**  
 Pada tanggal : 23 Maret 2020  
 An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
 KABUPATEN BOYOLALI  
 Karo Ketahanan Seni, Budaya, Agama,  
 dan Kemasyarakatan, dan Ekonomi



**SRINI SUARDIYANTI, SE**  
 Penata  
 NIP. 19710509 199303 2 003



**TEMBUSAN** Kepada Yth. :

- Bupati Boyolali (sebagai laporan);
- Kapolres Boyolali;
- Kepala BP3D Kab. Boyolali;
- Kepala BKD Kab. Boyolali;
- Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Boyolali;
- Ketua DPC Partai : PDIP, Golkar, PKB, PKS, dan Gerindra Kab. Boyolali;
- Dekan FEBI IAIN Surakarta;
- Yang Bersangkutan;
- Pertinggal.

### Lampiran 3

## KUESIONER PENELITIAN

Boyolali, Maret 2020

Kepada Yang Terhormat Responden Penelitian di Tempat,

Saya Anis Monika, mahasiswa S-1 Akuntansi Syariah IAIN Surakarta, mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian saya. Penelitian ini dilakukan dalam rangka pemebuhan Skripsi dengan dosen pembimbing Fahri Ali Ahzar, M.Si. Topik penelitian ini adalah mengenai Akuntabilitas Laporan Keuangan Partai Politik.

Saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu sejenak untuk mengisi dan melengkapi kuesioner yang telah disediakan di halaman berikut ini. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, dimohon pernyataan kuesioner dijawab secara keseluruhan. Data yang didapat dari kuesioner ini akan dijamin kerahasiaannya dan sepenuhnya hanya akan untuk kepentingan akademik.

Demikian permohonan ini saya ajukan. Terimakasih atas perhatiannya.

Hormat Saya,

Anis Monika

---

## KUESIONER PENELITIAN

### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama\*\* : .....
2. Umur\* : .....
3. Jenis Kelamin\* : .....
4. Pendidikan Terakhir\* : .....
5. Lama Bekerja\* : .....
6. Jabatan\* : .....

*\*wajib diisi*

*\*\*tidak wajib diisi*

#### Lampiran 4

### **KUESIONER ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Pada bagian ini, saya bermaksud meminta tanggapan anda atas pernyataan mengenai akuntabilitas laporan keuangan tahunan, akuntabilitas keuangan dana kampanye, dan akuntabilitas keuangan dana APBD laporan keuangan partai politik. Anda dimohon untuk mengungkapkan sejauh mana tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda terhadap masing-masing pernyataan tersebut dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia di sebelah kanan dari setiap pernyataan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	2	3	4

#### **Akuntabilitas Dari Keuangan Tahunan**

No	Keterangan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Partai politik melakukan penyusunan program dan rencana keuangan.				
2.	Partai politik melakukan pencatatan keuangan organisasi.				
3.	Partai menerima dana dari (iuran) anggota dimasukkan di rekening partai.				
4.	Partai melakukan penarikan rekening bank yang ditanda tangani oleh ketua partai.				
5.	Dana yang digunakan partai politik sesuai dengan rencana awal partai.				
6.	Pengelolaan keuangan partai politik sesuai dengan AD/ART.				
7.	Partai politik membuat laporan keuangan organisasi setiap akhir tahun.				
8.	Partai politik menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.				
9.	Laporan keuangan organisasi telah diaudit atau diperiksa oleh pihak yang berwenang (auditor/BPK).				
10.	Partai politik membuat laporan pertanggung jawaban pada akhir periode atau secara tahunan.				
11.	Laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD/APBN satu tahun sekali dilaporkan ke				

	Pemerintah.				
12.	Periode pelaporan keuangan tahunan partai politik sesuai dengan ketetapan pemerintah.				
13.	Partai politik membuat pembukuan (akuntansi) daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima dengan baik serta terbuka untuk publik.				
14.	Partai politik telah membuat rekening atas nama partai politik.				
15.	Partai politik membuat laporan keuangan tahunan partai politik mengacu pada undang-undang Parpol.				
16.	Hasil pemeriksaan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang telah diaudit oleh BPK terbuka untuk diketahui masyarakat.				
17.	Laporan keuangan tahunan partai politik dapat diakses secara mudah oleh publik melalui web resmi partai.				

### **Akuntabilitas dari Keuangan Dana Kampanye**

No	Keterangan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Partai politik telah membuat rekening khusus dan dana kampanye dengan baik.				
2.	Partai politik memberikan laporan awal dana kampanye ke KPU dengan baik.				
3.	Partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dan kampanye dalam bentuk uang ke KPU dengan baik.				
4.	Partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dan kampanye dalam bentuk jasa ke KPU dengan baik.				
5.	Partai politik melakukan pencatatan keuangan dana kampanye dengan baik.				
6.	Partai politik melaporkan daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye dengan baik.				
7.	Partai politik menyusun laporan keuangan dana kampanye sesuai dengan peraturan KPU No. 34 Tahun 2018.				
8.	Partai politik memberikan laporan saldo akhir dana kampanye ke KPU dengan baik.				
9.	Laporan dana kampanye telah diserahkan ke kantor akutan publik.				

10.	Laporan dana kampanye telah diserahkan kepada kantor akuntan publik sebelum 60 hari setelah pemungutan suara.				
11.	Partai politik membuat pelaporan pertanggung-jawaban dana kampanye ke KPU dengan baik				
12.	Laporan keuangan dana kampanye dapat diakses secara mudah oleh pemberi sumbangan.				
13.	Laporan keuangan dana kampanye dapat diakses secara mudah oleh publik.				
14.	Partai politik akan dikenakan sanksi sebagai pembatalan kandidat partai politik apabila partai politik tidak mematuhi peraturan yang berlaku.				

### Akuntabilitas Keuangan dari Dana APBD

No	Keterangan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Partai Politik memiliki rekening khusus atas nama partai.				
2.	Partai politik melakukan pencatatan keuangan dari dana APBD.				
3.	Partai politik menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau peraturan pemerintah.				
4.	Periode pelaporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan pemerintah.				
5.	Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).				
6.	Laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan dari dana APBD per tahun ke pemerintah.				
7.	Laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan dari dana APBD per tahun ke pemerintah.				

Lampiran 5

**KUESIONER PEMERINTAH DAERAH**

Pada bagian ini, saya bermaksud meminta tanggapan anda atas pernyataan mengenai akuntabilitas laporan keuangan tahunan, akuntabilitas keuangan dana kampanye, dan akuntabilitas keuangan dana APBD laporan keuangan partai politik. Anda dimohon untuk mengungkapkan sejauh mana tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda terhadap masing-masing pernyataan tersebut dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia di sebelah kanan dari setiap pernyataan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	2	3	4

**Akuntabilitas Dari Keuangan Tahunan**

No	Keterangan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik melakukan penyusunan program dan rencana keuangan.				
2.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah , partai politik melakukan pencatatan keuangan organisasi.				
3.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai menerima dana dari (iuran) anggota dimasukkan di rekening partai.				
4.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai melakukan penarikan rekening bank yang ditanda tangani oleh ketua partai.				
5.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, dana yang digunakan partai politik sesuai dengn rencana awal partai.				
6.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, pengelolaan keuangan partai politik sesuai dengan AD/ART.				
7.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik membuat laporan keuangan organisasi setiap akhir tahun.				
8.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.				

9.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, laporan keuangan organisasi telah diaudit atau diperiksa oleh pihak yang berwenang (auditor/BPK).				
10.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik membuat laporan pertanggung jawaban pada akhir periode atau secara tahunan.				
11.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD/APBN satu tahun sekali dilaporkan ke Pemerintah.				
12.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, periode pelaporan keuangan tahunan partai politik sesuai dengan ketentuan pemerintah.				
13.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik membuat pembukuan (akuntansi) daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima dengan baik serta terbuka untuk publik.				
14.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik telah membuat rekening atas nama partai politik.				
15.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik membuat laporan keuangan tahunan partai politik mengacu pada undang-undang Parpol.				
16.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, hasil pemeriksaan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang telah diaudit oleh BPK terbuka untuk diketahui masyarakat.				
17.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, laporan keuangan tahunan partai politik dapat diakses secara mudah oleh publik melalui web resmi partai.				

### Akuntabilitas dari Keuangan Dana Kampanye

No	Keterangan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik telah membuat rekening khusus dan dana kampanye dengan baik.				
2.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik memberikan laporan awal dana kampanye ke KPU dengan baik.				
3.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dan kampanye dalam bentuk uang ke KPU dengan baik.				
4.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dan kampanye dalam bentuk jasa ke KPU dengan baik.				
5.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik melakukan pencatatan keuangan dana kampanye dengan baik.				
6.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik melaporkan daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye dengan baik.				
7.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik menyusun laporan keuangan dana kampanye sesuai dengan peraturan KPU No. 34 Tahun 2018.				
8.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik memberikan laporan saldo akhir dana kampanye ke KPU dengan baik.				
9.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, laporan dana kampanye telah diserahkan ke kantor akutan publik.				
10.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, laporan dana kampanye telah diserahkan kepada kantor akuntan publik sebelum 60 hari setelah pemungutan suara.				
11.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik membuat pelaporan pertanggung-jawaban dana kampanye ke KPU dengan baik				
12.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, laporan keuangan dana kampanye dapat diakses secara mudah oleh pemberi sumbangan.				
13.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah,				



	laporan keuangan dana kampanye dapat diakses secara mudah oleh publik.				
14.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik akan dikenakan sanksi sebagai pembatalan kandidat partai politik apabila partai politik tidak mematuhi peraturan yang berlaku.				

### Akuntabilitas Keuangan dari Dana APBD

No	Keterangan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai Politik memiliki rekening khusus atas nama partai.				
2.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik melakukan pencatatan keuangan dari dana APBD.				
3.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, partai politik menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau peraturan pemerintah.				
4.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, periode pelaporan keuangan tahunan sesuai dengan ketetapan pemerintah.				
5.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).				
6.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan dari dana APBD per tahun ke pemerintah.				
7.	Menurut anda sebagai pihak pemerintah daerah, laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan dari dana APBD per tahun ke pemerintah.				

Lampiran 6

## HASIL DEMOGRAFI PARTAI POLITIK

### Statistics

		Pendidikan	Lama_Bekerja	Jabatan
N	Valid	30	30	30
	Missing	0	0	0

### Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D-3	2	6,7	6,7
	S-1	20	66,7	73,3
	S-2	1	3,3	76,7
	SD	2	6,7	83,3
	SMA	5	16,7	100,0
	Total	30	100,0	

### Lama\_Bekerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	12	40,0	40,0
	10	5	16,7	56,7
	15	5	16,7	73,3
	19	2	6,7	80,0
	20	2	6,7	86,7
	21	3	10,0	96,7
	27	1	3,3	100,0
	Total	30	100,0	

### Jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Anggota	16	53,3	53,3
	Pengurus	14	46,7	100,0
	Total	30	100,0	

Lampiran 7

**HASIL DEMOGRAFI PEMERINTAH DAERAH**

**Statistics**

		Pendidikan_Terakhir	Lama_Bekerja	Jabatan
N	Valid	5	5	5
	Missing	0	0	0

**Pendidikan\_Terakhir**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S1	5	100,0	100,0	100,0

**Lama\_Bekerja**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
6	2	40,0	40,0	40,0
10	1	20,0	20,0	60,0
Valid 12	1	20,0	20,0	80,0
14	1	20,0	20,0	100,0
Total	5	100,0	100,0	

**Jabatan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ketua Bidang	2	40,0	40,0	40,0
Valid Bidang Anggaran	3	60,0	60,0	100,0
Total	5	100,0	100,0	

Lampiran 8

**UJI RELIABILITAS**

**UJI RELIABILITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUNAN  
PARTAI POLITIK**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	35	100,0

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,935	17

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**UJI RELIABILITAS AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	35	100,0

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,949	14

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**UJI RELIABILITAS AKUNTABILITAS DANA APBD**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	35	100,0

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,913	7

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Lampiran 9

**UJI NORMALITAS**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		LAP_TAHUNA	DANA_KAMPA	DANA_APB
		N	NYE	
N		35	35	35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	57,09	47,97	24,29
	Std. Deviation	7,406	7,002	3,738
	Absolute	,131	,135	,211
Most Extreme Differences	Positive	,070	,126	,160
	Negative	-,131	-,135	-,211
Kolmogorov-Smirnov Z		,773	,799	1,250
Asymp. Sig. (2-tailed)		,589	,545	,088

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 10

**UJI T-test (UJI BEDA)**

**AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUNAN**

**Group Statistics**

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Keuangan_Tahunan	Partai politik	30	59,13	5,569	1,017
	Pemerintah Daerah	5	44,80	4,604	2,059

**Independent Samples Test**

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							
	F	Sig.	T	Df	Sig. (2- tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference		
								Lower	Upper	
Keuangan_Tahunan	Equal variances assumed	1,456	,236	5,433	33	,000	14,333	2,638	8,966	19,701
	Equal variances not assumed			6,241	6,138	,001	14,333	2,296	8,745	19,922

**AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE**

**Group Statistics**

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Dana_Kampanye	Partai Politik	30	49,90	5,202	,950
	Pemerintah Daerah	5	36,40	5,030	2,249

**Independent Samples Test**

	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means

		F	Sig.	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Dana_Kampanye	Equal variances assumed	,720	,402	5,394	33	,000	13,500	2,503	8,408	18,592
	Equal variances not assumed			5,529	5,529	,002	13,500	2,442	7,400	19,600

## AKUNTABILITAS DANA APBD

Group Statistics

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Dana_APB	Partai Politik	30	25,37	2,632	,481
	Pemerintah Daerah	5	17,80	2,683	1,200

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Dana_APB	Equal variances assumed	1,040	,315	5,936	33	,000	7,567	1,275	4,973	10,160
	Equal variances not assumed			5,854	5,367	,002	7,567	1,293	4,311	10,822

Lampiran 11

**UJI VALIDITAS**  
**UJI VALIDITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUNAN PARTAI POLITIK**

**Correlations**

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	TOTALP
P1	Pearson Correlation	1	,524	,317	,363	,306	,121	,408	,462	,356	,320	,273	,250	,454	,375	,408	,460	,469	,573
	Sig. (2-tailed)		,001	,064	,032	,074	,490	,015	,005	,036	,061	,113	,147	,006	,026	,015	,005	,004	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P2	Pearson Correlation	,524	1	,041	,434	,260	,073	,602	,635	,451	,305	,352	,595	,332	,359	,560	,508	,161	,600
	Sig. (2-tailed)	,001		,816	,009	,131	,676	,000	,000	,007	,075	,038	,000	,051	,034	,000	,002	,356	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P3	Pearson Correlation	,317	,041	1	,531	,392	,245	,279	,059	,205	,326	,109	,297	,541	,032	,132	,257	,144	,387
	Sig. (2-tailed)	,064	,816		,001	,020	,155	,104	,735	,237	,056	,532	,084	,001	,857	,450	,136	,409	,022
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P4	Pearson Correlation	,363	,434	,531	1	,178	,395	,469	,483	,505	,568	,419	,488	,408	,437	,355	,586	,173	,647
	Sig. (2-tailed)	,032	,009	,001		,306	,019	,004	,003	,002	,000	,012	,003	,015	,009	,037	,000	,320	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P5	Pearson Correlation	,306	,260	,392	,178	1	,399	,650	,246	,417	,475	,135	,257	,559	,456	,530	,328	,425	,584
	Sig. (2-tailed)	,074	,131	,020	,306		,018	,000	,155	,013	,004	,441	,136	,000	,006	,001	,054	,011	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P6	Pearson Correlation	,121	,073	,245	,395	,399	1	,502	,431	,455	,587	,455	,277	,322	,720	,452	,389	,259	,604
	Sig. (2-tailed)	,490	,676	,155	,019	,018		,002	,010	,006	,000	,006	,108	,059	,000	,006	,021	,133	,000



P7	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,408	,602	,279	,469	,650	,502	1	,587	,633	,625	,338	,578	,617	,667	,702	,643	,315	,811
	Sig. (2-tailed)	,015	,000	,104	,004	,000	,002		,000	,000	,000	,047	,000	,000	,000	,000	,000	,065	,000
P8	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,462	,635	,059	,483	,246	,431	,587	1	,407	,531	,332	,518	,477	,652	,696	,439	,339	,707
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,735	,003	,155	,010	,000		,015	,001	,052	,001	,004	,000	,000	,008	,047	,000
P9	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,356	,451	,205	,505	,417	,455	,633	,407	1	,673	,761	,543	,492	,719	,491	,625	,479	,782
	Sig. (2-tailed)	,036	,007	,237	,002	,013	,006	,000	,015		,000	,000	,001	,003	,000	,003	,000	,004	,000
P10	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,320	,305	,326	,568	,475	,587	,625	,531	,673	1	,673	,594	,575	,762	,652	,758	,628	,859
	Sig. (2-tailed)	,061	,075	,056	,000	,004	,000	,000	,001	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
P11	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,273	,352	,109	,419	,135	,455	,338	,332	,761	,673	1	,622	,320	,657	,359	,693	,479	,684
	Sig. (2-tailed)	,113	,038	,532	,012	,441	,006	,047	,052	,000	,000		,000	,061	,000	,034	,000	,004	,000
P12	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,250	,595	,297	,488	,257	,277	,578	,518	,543	,594	,622	1	,546	,462	,589	,672	,437	,737
	Sig. (2-tailed)	,147	,000	,084	,003	,136	,108	,000	,001	,001	,000	,000		,001	,005	,000	,000	,009	,000
P13	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,454	,332	,541	,408	,559	,322	,617	,477	,492	,575	,320	,546	1	,540	,493	,587	,572	,740
	Sig. (2-tailed)	,006	,051	,001	,015	,000	,059	,000	,004	,003	,000	,061	,001		,001	,003	,000	,000	,000
P14	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,375	,359	,032	,437	,456	,720	,667	,652	,719	,762	,657	,462	,540	1	,627	,668	,462	,827
	Sig. (2-tailed)	,026	,034	,857	,009	,006	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,005	,001		,000	,000	,005	,000

P15	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	Pearson Correlation	,408	,560	,132	,355	,530	,452	,702	,696	,491	,652	,359	,589	,493	,627	1	,611	,531	,787
	Sig. (2-tailed)	,015	,000	,450	,037	,001	,006	,000	,000	,003	,000	,034	,000	,003	,000		,000	,001	,000
P16	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	Pearson Correlation	,460	,508	,257	,586	,328	,389	,643	,439	,625	,758	,693	,672	,587	,668	,611	1	,558	,835
	Sig. (2-tailed)	,005	,002	,136	,000	,054	,021	,000	,008	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
P17	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	Pearson Correlation	,469	,161	,144	,173	,425	,259	,315	,339	,479	,628	,479	,437	,572	,462	,531	,558	1	,640
	Sig. (2-tailed)	,004	,356	,409	,320	,011	,133	,065	,047	,004	,000	,004	,009	,000	,005	,001	,000		,000
TOT ALP	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	Pearson Correlation	,573	,600	,387	,647	,584	,604	,811	,707	,782	,859	,684	,737	,740	,827	,787	,835	,640	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,022	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	

### UJI VALIDITAS AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE

		Correlations														
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	TOTAL Q
Q1	Pearson Correlation	1	,670	,830	,742	,715	,524	,637	,680	,568	,689	,556	,415	,356	,545	,828
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,001	,013	,036	,001	,000
Q2	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,670	1	,742	,764	,729	,664	,746	,713	,637	,634	,721	,581	,422	,536	,887
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,012	,001	,000

	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,830	,742	1	,648	,743	,569	,708	,731	,501	,594	,547	,413	,372	,455	,823
Q3	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,002	,000	,001	,014	,028	,006	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,742	,764	,648	1	,621	,623	,595	,731	,713	,865	,622	,521	,406	,485	,863
Q4	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,015	,003	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,715	,729	,743	,621	1	,721	,644	,768	,605	,616	,414	,474	,441	,436	,822
Q5	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,013	,004	,008	,009	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,524	,664	,569	,623	,721	1	,594	,682	,464	,466	,485	,458	,433	,412	,745
Q6	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,005	,005	,003	,006	,009	,014	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,637	,746	,708	,595	,644	,594	1	,405	,461	,468	,735	,642	,405	,627	,804
Q7	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,016	,005	,005	,000	,000	,016	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,680	,713	,731	,731	,768	,682	,405	1	,625	,807	,344	,378	,327	,342	,785
Q8	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,016		,000	,000	,043	,025	,055	,044	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,568	,637	,501	,713	,605	,464	,461	,625	1	,721	,664	,420	,539	,475	,772
Q9	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,000	,000	,005	,005	,000		,000	,000	,012	,001	,004	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,689	,634	,594	,865	,616	,466	,468	,807	,721	1	,510	,504	,231	,461	,790
Q10	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,005	,005	,000	,000		,002	,002	,183	,005	,000

	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,556	,721	,547	,622	,414	,485	,735	,344	,664	,510	1	,458	,344	,564	,744
Q11	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,001	,000	,013	,003	,000	,043	,000	,002		,006	,043	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,415	,581	,413	,521	,474	,458	,642	,378	,420	,504	,458	1	,558	,766	,692
Q12	Sig. (2-tailed)	,013	,000	,014	,001	,004	,006	,000	,025	,012	,002	,006		,001	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,356	,422	,372	,406	,441	,433	,405	,327	,539	,231	,344	,558	1	,599	,580
Q13	Sig. (2-tailed)	,036	,012	,028	,015	,008	,009	,016	,055	,001	,183	,043	,001		,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,545	,536	,455	,485	,436	,412	,627	,342	,475	,461	,564	,766	,599	1	,705
Q14	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,006	,003	,009	,014	,000	,044	,004	,005	,000	,000	,000		,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,828	,887	,823	,863	,822	,745	,804	,785	,772	,790	,744	,692	,580	,705	1
TOT	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
ALQ	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

### UJI VALIDITAS AKUNTABILITAS DANA APBD

		Correlations						
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
	Pearson Correlation	1	,628	,766	,750	,578	,492	,530
R1	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,003	,001
	N	35	35	35	35	35	35	35

	Pearson Correlation	,628	1	,750	,624	,605	,482	,442	,817
R2	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,003	,008	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,766	,750	1	,743	,800	,800	,593	,953
R3	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,750	,624	,743	1	,506	,580	,670	,858
R4	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,002	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,578	,605	,800	,506	1	,628	,320	,768
R5	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,002		,000	,061	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,492	,482	,800	,580	,628	1	,491	,768
R6	Sig. (2-tailed)	,003	,003	,000	,000	,000		,003	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,530	,442	,593	,670	,320	,491	1	,705
R7	Sig. (2-tailed)	,001	,008	,000	,000	,061	,003		,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson Correlation	,832	,817	,953	,858	,768	,768	,705	1
TOT	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
ALR	N	35	35	35	35	35	35	35	35

Lampiran 12

**HASIL TABULASI DATA PARTAI POLITIK**

No	Karakteristik Responden			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	Total
	Pendidikan Terakhir	Lama Bekerja	Jabatan																		
1	S-1	10	Pengurus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
2	S-1	10	Pengurus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
3	S-1	5	Pengurus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	65
4	S-1	5	Pengurus	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
5	S-1	5	Pengurus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
6	S-1	5	Anggota	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
7	S-2	20	Anggota	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	53
8	D-3	2.5	Anggota	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
9	S-1	10	Anggota	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
10	S-1	10	Anggota	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
11	S-1	19	Pengurus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
12	S-1	20	Pengurus	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	63
13	S-1	27	Pengurus	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	55
14	SD	15	Anggota	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	63
15	SMA	15	Anggota	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	63
16	SMA	15	Anggota	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	63
17	SD	15	Anggota	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	64
18	SMA	19	Anggota	3	3	4	4	4	4	4	2	3	4	3	3	3	3	4	4	3	58
19	S-1	5	Anggota	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	55

20	S-1	5	Anggota	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	58
21	S-1	5	Anggota	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	60
22	S-1	21	Anggota	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	55
23	SMA	5	Pengurus	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3	57
24	S-1	5	Pengurus	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	59
25	D-3	15	Pengurus	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	53
26	S-1	21	Pengurus	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	59
27	S-1	5	Pengurus	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	63
28	S-1	5	Anggota	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	56
29	SMA	21	Pengurus	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	56
30	S-1	5	Anggota	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	56

No	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42

12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	54
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	53
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	53
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	53
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
19	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	46
20	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	48
21	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	1	3	4	3	45
22	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	48
23	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	48
24	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	47
25	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	47
26	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	48
27	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	51
28	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	47
29	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	48
30	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	47

No	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	4	4	4	4	4	4	28
3	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	4	28



5	3	3	3	3	3	3	3	21
6	3	3	3	3	3	3	3	21
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	4	4	4	4	4	4	4	28
10	3	3	3	3	3	3	3	21
11	4	4	4	4	4	4	3	27
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	4	4	4	4	4	4	4	28
16	4	4	4	4	4	4	4	28
17	4	4	4	4	4	4	4	28
18	4	4	3	2	3	3	3	22
19	3	4	3	3	3	4	3	23
20	3	4	3	3	4	3	3	23
21	4	3	3	4	3	3	4	24
22	4	3	3	4	3	3	4	24
23	3	4	3	3	4	3	4	24
24	4	3	3	3	4	3	3	23
25	3	4	3	3	3	3	3	22
26	4	3	3	4	3	4	3	24
27	4	3	4	3	4	4	3	25
28	4	3	3	4	3	3	4	24
29	3	4	3	4	3	4	4	25
30	4	3	3	4	3	3	4	24

Lampiran 13

**HASIL TABULASI DATA PEMERINTAH DAERAH**

No	Karakteristik Responden			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	Total
	Pendidikan Terakhir	Lama Bekerja	Jabatan																		
1	S-1	12	Bidang Anggaran	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2	1	2	2	1	2	37
2	S-1	6	Bidang Anggaran	2	3	4	4	2	3	2	2	3	3	4	4	3	2	1	3	2	47
3	S-1	10	Ketua Bidang	3	4	3	3	3	4	4	4	2	2	2	3	3	3	3	2	1	49
4	S-1	14	Bidang Anggaran	4	4	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	1	3	3	3	45
5	S-1	6	Ketua Bidang	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	46

No	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Total
1	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	33
2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	36
3	3	2	2	3	2	1	2	3	4	4	3	3	3	3	38
4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	2	2	2	44
5	2	1	1	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	31

No	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Total
1	2	1	2	2	3	3	2	15
2	2	1	2	2	2	3	4	16
3	3	3	2	3	3	2	2	18
4	3	2	3	3	4	4	3	22
5	3	2	2	2	3	3	3	18

## Lampiran 14

### BUKTI PLAGIASI

ANIS MONIKA\_165221192\_SI

3 menit yang lalu

25%

Risiko dari plagiarisme

**TERTINGGI**

Parafrase

Kutipan salah

Konsentrasi

4%

0%

★★★★

↶

Bagikan

📄

Dalam

?

\$ 1.00

📄

**BARU**

Artikel ilmiah

?

\$ 3.00

AB

Mengoreksi

>

🗑️

Hapus plagiarisme

>

🎨

Pemeriksaan tata letak

>

🔒

Lihat laporan

\$ 0.00